



Padang Panjang

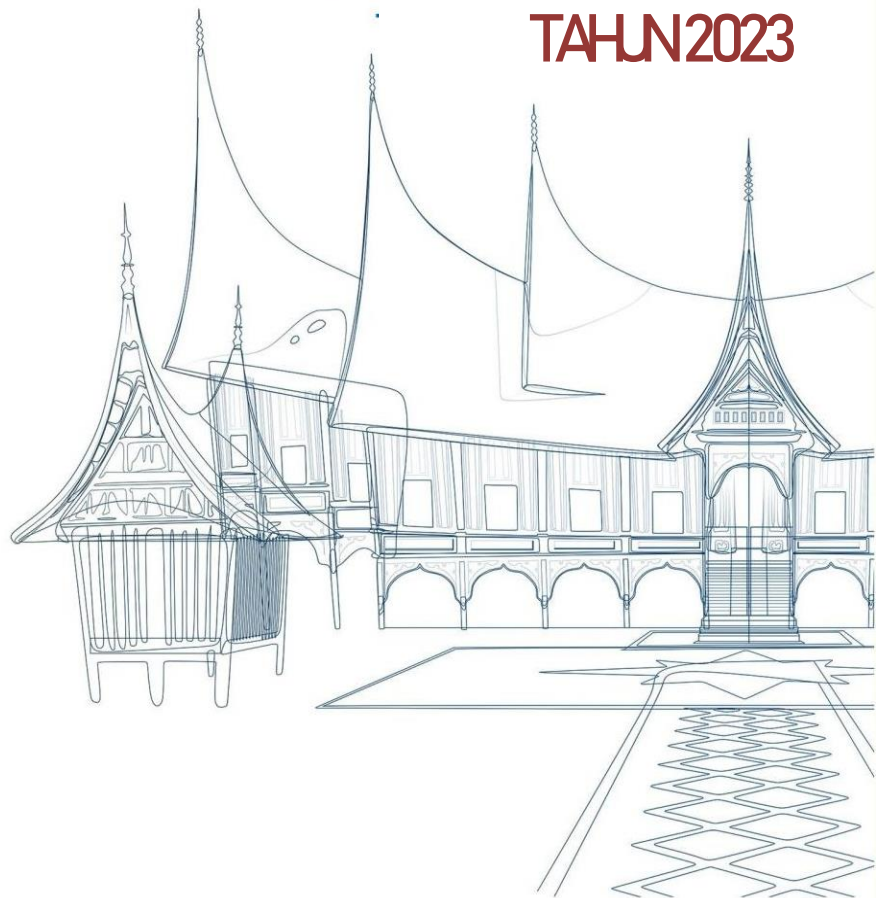
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

Dinas Komunikasi dan Informatika

Kota Padang Panjang



TAHUN 2023



KATA PENGANTAR

Puji Syukur ke hadirat Allah SWT, berkat rahmat dan karunianya penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIIP) pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang Tahun 2023 dapat dituntaskan. Laporan ini merupakan salah satu bentuk media informasi yang berisikan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas, fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

Penyusunan Laporan Kinerja ini bertujuan untuk memberikan informasi yang terukur kepada publik atas kinerja yang telah dicapai dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang selama Tahun 2023, sekaligus sebagai pedoman bagi upaya perbaikan berkesinambungan guna meningkatkan kinerja di tahun selanjutnya.

Padang Panjang, Desember 2023

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

Kota Padang Panjang



Drs. AMPERA, SH.M.Si

NIP. 19680101 199803 1 010

Dalam rangka mewujudkan Visi Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang 2019-2023, yang mengusung tema “*Untuk Kejayaan Padang Panjang yang Bermarwah dan Bermartabat*”, sebagai penjabaran visi tersebut Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya mempunyai peran strategis dalam pencapaian misi ketiga Walikota yaitu “*Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif, Inovatif dan Partisipatif*”. Peran tersebut lebih lanjut dijabarkan melalui Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang Tahun 2019-2023 dengan mengusung 2 (dua) tujuan yakni “Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah” dan Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur berkelanjutan dan 4 (empat) sasaran strategis.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang ini, merupakan bentuk akuntabilitas dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2023. Selain itu juga memberikan gambaran dan evaluasi kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang selama Tahun Anggaran 2023.

Pencapaian sasaran strategis melalui 4 (empat) indikator kinerja utama (IKU) pada tahun 2023 ini sangat baik karena seluruh target dalam Perubahan Renstra Tahun 2023-2023 dapat tercapai. Jika dibandingkan dengan target dalam perjanjian kinerja dari (empat) sasaran strategis baru 3 (tiga) indikator sudah mencapai bahkan melampaui target atau dengan predikat kinerja sangat baik, sementara 1 (satu) indikator belum mencapai target namun dengan predikat kinerja baik. Capaian kinerja untuk Hal ini disebabkan adanya penyesuaian berupa penambahan target pada perjanjian kinerja karena adanya peningkatan capaian kinerja indikator ini pada tahun sebelumnya.

Terkait dengan capaian kinerja keuangan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 8.998.787.789,- dapat terealisasi sebesar Rp.8.685.335.425 atau mencapai 96,52% atau dengan predikat kinerja keuangan Sangat Baik. Efisiensi belanja pada tahun 2023 sebesar 3,48 %,

dari total anggaran yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan akuntabilitas kinerja telah terjadi efisiensi, yaitu tercapainya target yang telah ditentukan akan tetapi terdapat penghematan anggaran terutama dari belanja pemeliharaan infrastruktur teknologi informasi.

Secara umum faktor pendukung untuk pencapaian indikator kinerja utama adalah adanya perbaikan tata kelola, dukungan pimpinan maupun adanya kolaborasi yang baik antara stakeholder terkait. Sementara untuk faktor penghambat berasal dari masih terbatasnya kapasitas SDM pengelola TIK.

Berdasarkan paparan di atas, terdapat berapa rekomendasi perbaikan kinerja kedepan diperlukan berupa peningkatan kualitas SDM TIK terkait pengamanan informasi, pengelolaan statistik sektoral, Daftar Informasi Publik serta publikasi website. Selain itu perlu dilakukan penyusunan regulasi dan dokumen perencanaan terkait pengelolaan SPBE dan Smart City.

Daftar Isi

KATA PENGANTAR.....	i
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Maksud dan Tujuan :	2
C. Penjelasan Umum Organisasi.....	2
D. Permasalahan Utama (Strategic Issued) yang dihadapi OPD	14
E. Sistematika Penyusunan LKjIP	14
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	16
A. Visi dan Misi.....	16
B. Tujuan dan Sasaran.....	18
C. Perjanjian Kinerja Dinas Kominfo Tahun 2023....	21
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 2023.....	23
A. Capaian Kinerja Organisasi	23
B. Realisasi Anggaran.....	55
BAB IV PENUTUP	59

Daftar Gambar

- a. Gambar 1.1 Bagan Struktur Organisasi Dinas Kominfo.....5
- b. Gambar 3.1 Hasil Penilaian Indeks SPBE Kota Padang Panjang
Tahun 2023.....26
- c. Gambar 3.3 Tampilan Portal Satu Data Kota Padang Panjang.....44

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Pegawai Dinas Kominfo berdasarkan Jenis Kepegawaian.....	12
Tabel 1.2	Pegawai Dinas Kominfo berdasarkan Eselon/Jabatan	13
Tabel 1.3	Pegawai ASN Dinas Kominfo berdasarkan latar belakang pendidikan.....	13
Tabel 2.1	Tujuan dan Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang	19
Tabel 2.2	Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang	20
Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023	21
Tabel 3.1	Skala Pengukuran Indikator Kinerja	23
Tabel 3.1.1	Pengukuran Capaian Kinerja tahun 2023	24
Tabel 3.1.2	Predikat Indeks SPBE.....	25
Tabel 3.1.3	Hasil Penilaian Indeks SPBE Kota Padang Panjang Tahun 2023.....	26
Tabel 3.1.4	Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1	29
Tabel 3.1.5	Perbandingan Realisasi Kinerja s/d 2023 dan Target Akhir Renstra Sasaran Strategis 1.....	30
Tabel 3.1.6	Perbandingan Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023 dengan Standar Nasional Sasaran Strategis 1.....	30
Tabel 3.1.7	Realisasi Kinerja program Pendukung Sasaran Strategis 1.....	31
Tabel 3.2.1	Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2023 Sasaran Strategis 1	35
Tabel 3.2.2	Hasil Penilaian Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2023	35
Tabel 3.2.3	Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2	36
Tabel 3.2.4	Perbandingan Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023 dan Target Akhir Renstra Sasaran Strategis 2	37
Tabel 3.2.5	Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2023 dengan Standar Nasional Sasaran Strategis 2.....	37
Tabel 3.2.6	Realisasi Kinerja Program Pendukung Sasaran Strategis 2	37
Tabel 3.3.1	Pengukuran Capaian Kinerja tahun 2023 Sasaran Strategis 3.....	40
Tabel 3.3.2	Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3	42
Tabel 3.3.3	Perbandingan Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023 dan Target Akhir Renstra Sasaran Strategis 3	42
Tabel 3.3.4	Perbandingan Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023 dengan Standar Nasional Sasaran Strategis 3.....	42
Tabel 3.3.5	Realisasi Kinerja Program Pendukung Sasaran Strategis 3.....	44
Tabel 3.4.1	Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 4	46

Tabel 3.4.2	Tabel Perhitungan Nilai SKM Layanan Website Dinas Kominfo Kota Padang Panjang	46
Tabel 3.4.3	Tabel perhitungan nilai SKM Layanan WIFI Dinas Kominfo Kota Padang Panjang	46
Tabel 3.4.4	Perbandingan Capaian kinerja Sasaran Strategis 4	49
Tabel 3.4.5	Perbandingan Realisasi Kinerja s/d tahun 2023 dan Target Akhir Renstra Sasaran Strategis 4	49
Tabel 3.4.6	Perbandingan realisasi Kinerja s/d Tahun 2023 dengan Standar Nasional Sasaran Strategis 4.....	50
Tabel 3.4.7	Realisasi kinerja dan Anggaran Program Pendukung Sasaran Strategis 4	51
Tabel 3.5	Efisiensi atas Sumber Daya yang Tersedia	53
Tabel 3.6	Realisasi Anggaran	55

Daftar Gambar

Gambar 1.1 Bagan Struktur Organisasi Dinas Kominfo.....	5
Gambar 3.1 Hasil Penilaian Index SPBE Kota Padang Panjang Tahun 2023.....	26
Gambar 3.3 Tampilan Portal Satu Data Kota Padang Panjang.....	41

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) tidak dapat dilepaskan dari prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan yaitu transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas dalam rangka mewujudkan tujuan akhir penyelenggaraan pemerintahan, yaitu kesejahteraan masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) mengamanatkan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) sebagai kewajiban formal bagi setiap Instansi Pemerintah guna mempertanggungjawabkan dan melaporkan hasil kinerja atau keberhasilan yang telah dicapai atas program dan kegiatan yang telah dilaksanakan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah. LKjIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang Tahun 2023 ini disusun berdasarkan perjanjian kinerja yang telah disepakati dan menyajikan informasi tentang rencana dan target kinerja yang ditetapkan, pengukuran kinerja, serta evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis dalam pelaksanaan program/kegiatan terkait dengan urusan wajib pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian.

B. Maksud dan Tujuan :

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dimaksudkan sebagai media pertanggungjawaban kepada publik, yang berisi informasi mengenai tercapainya sasaran, realisasi pencapaian indikator sasaran disertai dengan penjelasan yang memadai atas kinerja dan perbandingan capaian indikator kinerja.

Adapun tujuan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini adalah :

1. Sebagai indikator dalam menilai keberhasilan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang dalam pelaksanaan tugas dan fungsi .
2. Sarana evaluasi sekaligus memberikan umpan balik (feed back) dalam rangka penyempurnaan kinerja instansi dalam mewujudkan visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan

C. Penjelasan Umum Organisasi

C.1 Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 7 Tahun 2019, dan Peraturan Walikota Padang Panjang 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai pelaksana urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, bidang Statistik dan bidang persandian serta tugas pembantuan yang diberikan.

Terkait dengan tugas diatas, Dinas Kominfo Kota Padang Panjang mempunyai fungsi sebagai berikut ;

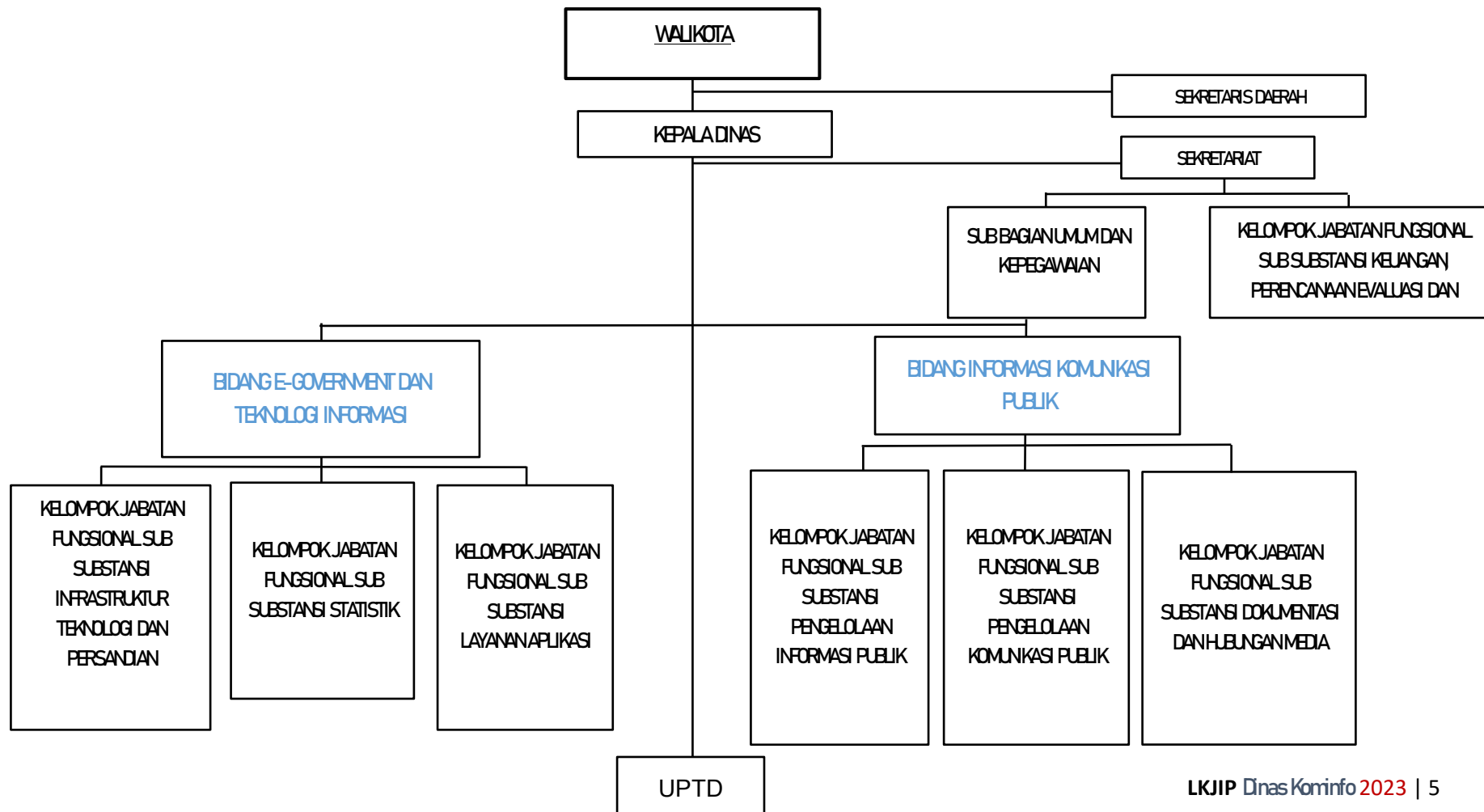
1. perumusan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan persandian;
2. pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan persandian;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan persandian;
4. pelaksanaan administrasi dinas di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan persandian; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang mempunyai susunan organisasi dan tata kerja sebagai berikut :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2) Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
3. Bidang E-Government dan Teknologi Informasi, terdiri dari:
 - 1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Infrastruktur Teknologi dan Persandian;
 - 2) Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Statistik; dan
 - 3) Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Layanan Aplikasi.
4. Bidang Informasi Komunikasi Publik terdiri dari:
 - 1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Pengelolaan Informasi Publik;
 - 2) Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Pengelolaan Komunikasi Publik; dan

- 3) Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Dokumentasi dan Hubungan Media;
5. UPTD.

Gambar 1.1
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PADANG PANJANG



Tugas pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang adalah sebagai berikut :

1. **Kepala Dinas**, mempunyai tugas membantu Walikota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan persandian. Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan persandian;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan persandian;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan persandian;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan persandian; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

2. **Sekretariat**, dikepalai oleh Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika. Untuk melaksanakan tugas tersebut Sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana di bidang administrasi umum, kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan;
 - b. pengelolaan program administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
 - c. pelaksanaan urusan hukum, organisasi dan tata laksana serta kehumasan; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud, Sekretariat terdiri dari :

- 1) **Sub Bagian Umum dan Kepegawaian** yang dikepalai oleh Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan program administrasi umum dan kepegawaian dalam arti melaksanakan kegiatan administrasi umum dan kepegawaian, urusan surat menyurat, kearsipan, ekspedisi, pengandaan, administrasi perjalanan dinas, ke rumah tangga, peralatan dan perlengkapan kantor, melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, hukum, organisasi dan tata laksana serta kehumasan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

- a) penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang administrasi umum dan kepegawaian;
 - b) pengelolaan urusan administrasi umum yang meliputi surat masuk, surat keluar, kehumasan dan dokumentasi, perlengkapan, rumah tangga, sarana prasarana dan aset;
 - c) pengelolaan urusan kepegawaian meliputi mutasi, disiplin, kesejahteraan, data, dan peningkatan kapasitas pegawai; dan
 - d) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.
- 2) **Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan** yang dikepalai oleh Sub Koordinator Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan dalam arti melaksanakan penyusunan anggaran, pembukuan, akuntansi dan verifikasi, pertanggungjawaban dan laporan keuangan serta menyusun perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan persandian.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi:

- a) Penata usahaan keuangan;
- b) pelaksanaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan; dan
- c) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya. Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.

3. **Bidang E-Government dan Teknologi Informasi**, yang dikepalai oleh Kepala Bidang E-Government dan Teknologi Informasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Komunikasi dan Informatika di bidang e-Government dan teknologi informasi dalam arti merencanakan, mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas bidang e-Government dan teknologi informasi.

Untuk menyelenggarakan tugas Bidang E-Government dan Teknologi Informasi mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan Infrastruktur Teknologi dan Persandian;
- b. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan Statistik;
- c. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan Layanan Aplikasi; dan
- d. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang E-Government dan Teknologi Informasi terdiri dari:

- 1) **Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Infrastruktur Teknologi dan Persandian** yang dikepalai oleh Sub Koordinator Infrastruktur Teknologi dan Persandian mempunyai tugas menyelenggarakan program infrastruktur teknologi dan persandian dalam arti melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan infrastruktur teknologi dan persandian.

Untuk melaksanakan tugas Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Infrastruktur Teknologi dan Persandian mempunyai fungsi:

- a) perencanaan teknis infrastruktur teknologi dan persandian;
- b) pelaksanaan teknis infrastruktur teknologi dan persandian;
- c) pembuatan laporan dan evaluasi teknis infrastruktur teknologi dan persandian; dan
- d) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

- 2) **Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Statistik yang dikepalai oleh Sub Koordinator Statistik** mempunyai tugas melaksanakan program Statistik dalam arti melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan Statistik.

Untuk melaksanakan tugas Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Statistik menyelenggarakan fungsi :

- a) perencanaan teknis statistik;
- b) pelaksanaan teknis statistik;
- c) pembuatan laporan dan evaluasi teknis statistik; dan
- d) pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

- 3) **Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Layanan Aplikasi yang dikepalai oleh Sub Koordinator Layanan Aplikasi** mempunyai tugas menyelenggarakan program Layanan Aplikasi dalam arti melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan Layanan Aplikasi.

Untuk melaksanakan tugas Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Layanan Aplikasi menyelenggarakan fungsi :

- a) perencanaan teknis Layanan Aplikasi;
- b) pelaksanaan teknis Layanan Aplikasi;
- c) pembuatan laporan dan evaluasi teknis Layanan Aplikasi; dan
- d) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

4. **Bidang Informasi Komunikasi Publik** yang dikepalai oleh Kepala Bidang Informasi Komunikasi Publik mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Komunikasi dan Informatika di bidang informasi komunikasi publik dalam arti merencanakan, mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas bidang informasi komunikasi publik.

Untuk melaksanakan tugas Bidang Informasi Komunikasi Publik mempunyai fungsi

- a. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan pengelolaan informasi publik;
- b. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan pengelolaan komunikasi publik;
- c. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan dokumentasi dan hubungan media; dan
- d. pelaksanaan tugas kedinasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bidang Informasi Komunikasi Publik, terdiri dari:

- 1) **Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Pengelolaan Informasi Publik** yang dikepalai oleh Sub Koordinator Pengelolaan Informasi Publik mempunyai tugas menyelenggarakan program pengelolaan informasi publik dalam arti melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan pengelolaan informasi publik.

Untuk melaksanakan tugas Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Pengelolaan Informasi Publik mempunyai fungsi :

- a) perencanaan teknis pengelolaan informasi publik;
- b) pelaksanaan teknis pengelolaan informasi publik;
- c) pembuatan laporan dan evaluasi teknis pengelolaan informasi publik; dan
- d) pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

2) Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Pengelolaan Komunikasi Publik yang dikepalai oleh Sub Koordinator Pengelolaan Komunikasi Publik mempunyai tugas menyelenggarakan program pengelolaan komunikasi publik dalam arti melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan pengelolaan komunikasi publik.

Untuk melaksanakan tugas Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Pengelolaan Komunikasi Publik mempunyai fungsi :

- a) perencanaan teknis pengelolaan komunikasi publik;
- b) pelaksanaan teknis pengelolaan komunikasi publik;
- c) pembuatan laporan dan evaluasi program dan kegiatan pengelolaan komunikasi publik; dan
- d) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

3) Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Dokumentasi dan Hubungan Media yang dikepalai oleh Sub Koordinator Dokumentasi dan Hubungan Media mempunyai tugas menyelenggarakan dokumentasi dan hubungan media dalam arti melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan dokumentasi dan hubungan media.

Untuk melaksanakan tugas Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Dokumentasi dan Hubungan Media mempunyai fungsi :

- a) perencanaan teknis dokumentasi dan hubungan media;
- b) pelaksanaan teknis dokumentasi dan hubungan media;
- c) pembuatan laporan dan evaluasi program dan kegiatan dokumentasi dan hubungan media; dan
- d) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

5. Unit Pelaksana Teknis Daerah

Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan tugas penunjang tertentu di lingkungan Dinas dapat dibentuk UPTD.

C.2 Sumber Daya Manusia Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang

Berdasarkan kondisi tahun 2023, Sumber Daya Aparatur pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang berjumlah 70 orang terdiri dari 28 orang ASN dan 42 orang tenaga harian lepas (THL). Adapun gambaran statistik pegawai yang ada di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 1.1
Pegawai Dinas Kominfo berdasarkan jenis kepegawaian

No.	Uraian	Jenis Kepegawaian		
		ASN	PPPK	THL
1	Golongan IV	2 orang	-	-
2	Golongan III	19 orang	1 orang	
3	Golongan II	4 orang	2 orang	
4	Non Golongan	-	-	42 orang
	Total Pegawai	73 orang		

Dari tabel diatas terlihat bahwa dari keseluruhan pegawai pada Dinas Kominfo didominasi oleh Pegawai THL sebanyak 62%, dan ASN (PNS dan PPPK) sebesar 28%. Hal ini dikarenakan banyaknya formasi jabatan teknis pada Dinas Kominfo yang belum diisi oleh ASN seperti programmer dan tenaga liputan.

Tabel 1.2
Pegawai Dinas Kominfo berdasarkan Eselon/Jabatan

No.	Uraian	Jumlah
1	Eselon II	1 orang
2	Eselon III	3 orang
3	Eselon IV.a	1 orang
4	Jabatan Fungsional Keahlian	10 orang
5	Jabatan Fungsional Umum	13 orang

Dari Tabel di atas terlihat bahwa pada tahun 2023, komposisi pegawai pada Dinas Kominfo didominasi oleh jabatan fungsional baik keahlian sebesar 36% dan jabatan fungsional pelaksana sebesar 47%. Hal ini dikarenakan keberadaan pegawai yang berasal dari penyetaraan eselon IV dan pegawai PPPK yang langsung menempati jabatan fungsional keahlian.

Tabel 1.3
Pegawai ASN Dinas Kominfo berdasarkan Latar Belakang Pendidikan

No.	Uraian	Jumlah
1	Strata II	3 orang
2	Strata I	14 orang
3	Diploma III	8 orang
4	SLTA	3 orang

Latar belakang pegawai ASN Dinas Kominfo berdasarkan pendidikan didominasi Strata 1 atau Sarjana, selanjutnya adalah pendidikan teknis (diploma III), Strata II dan SLTA.

D. Permasalahan Utama (Strategic Issued) yang dihadapi OPD

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Kominfo Kota Padang Panjang adalah kondisi yang menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Dinas Kominfo dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Penentuan Isu-isu strategis pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang sesuai dengan hasil analisa permasalahan internal dan eksternal adalah sebagai berikut :

1. Percepatan transformasi digital melalui penyelenggaraan pemerintahan daerah berbasis elektronik (SPBE).
2. Peningkatan kualitas konten layanan audio visual dan multimedia dalam rangka transparansi, diseminasi dan keterbukaan informasi publik.
3. Penyediaan data statistik sektoral yang mudah diakses oleh masyarakat guna percepatan Satu Data Indonesia.

E. Sistematika Penyusunan LKjIP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini disusun dengan sistematika penulisan yang mempedomani Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, sebagai berikut :

Pengantar

Daftar Isi

Bab I : Pendahuluan

- A. Latar Belakang
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Penjelasan Umum Organisasi
- D. Permasalahan utama yang dihadapi oleh OPD
- E. Sistematika Penyusunan LKj IP

Bab II : Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

- A. Visi dan Misi
- B. Tujuan dan Sasaran
- C. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Bab III : Akuntabilitas Kinerja 2023

- 1. Capaian Kinerja Organisasi
- 2. Realisasi Anggaran

Bab IV : Penutup

- A. Kesimpulan
- B. Saran

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan sebuah sistem dengan pendekatan manajemen berbasis kinerja (*performance-base management*) untuk penyediaan informasi kinerja guna pengelolaan kinerja. Dalam sistem akuntabilitas terdapat beberapa komponen antara lain perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, dan pencapaian sasaran/kinerja organisasi yang memerlukan upaya menyeluruh dari unit organisasi yang terkait.

Perencanaan merupakan titik awal dalam suatu sistem manajemen kinerja, karena perencanaan merupakan proses yang sangat penting mengingat besarnya pengaruh perencanaan itu sendiri terhadap proses-proses selanjutnya. Dokumen perencanaan strategis Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lebih lanjut dikenal dengan Renstra merupakan dokumen perencanaan pembangunan sekaligus dokumen perencanaan kinerja yang berfungsi sebagai pedoman dan penentu arah dalam melaksanakan program dan kegiatan OPD dalam rangka mewujudkan dan mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Terkait hal ini, dalam perencanaan kinerja tahun 2023, Dinas Komunikasi dan Informatika berpedoman pada Perubahan Rencana Strategis Dinas Kominfo Tahun 2019-2023.

A. Visi dan Misi

Visi dan misi Walikota Padang Panjang periode 2019-2023, merupakan dasar utama penyusunan kebijakan umum pembangunan daerah dalam RPJMD. Visi misi tersebut adalah sebagai berikut :

“Untuk Kejayaan Padang Panjang yang Bermarwah dan Bermartabat”

Dari visi tersebut terlihat bahwa terdapat 4 hal pokok yang menjadi landasan, fokus dan sasaran utama pembangunan yang diharapkan dapat dicapai dalam periode 5 tahun mendatang yaitu :

1. Memantapkan Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi
2. Pendidikan, Sosial dan Keagamaan
3. Kesehatan : Padang Panjang Sehat dan Bahagia
4. Memantapkan Pelayanan Publik dan Partisipasi Masyarakat
Dalam Pembangunan

Berdasarkan tugas dan fungsi yang dimiliki, dalam rangka pencapaian Misi Pemerintah Kota Padang Panjang, Dinas Kominfo berkontribusi untuk mewujudkan Misi ke-3 RPJMD yakni

Misi 3 RPJMD Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang
Responsif, Inovatif dan Partisipatif

yang selanjutnya diwujudkan melalui sasaran

Sasaran	Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
---------	---

Salah satu indikator dalam pencapaian sasaran RPJMD terkait kinerja pemerintahan ini adalah meningkatnya indeks Reformasi Birokrasi. Reformasi Birokrasi dalam hal ini dimaksudkan adalah terlaksananya berbagai upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business proses) dan sumber daya manusia aparatur sehingga tercipta birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.

Hal ini sejalan dengan upaya menjadikan Kota Padang Panjang sebagai kota yang cerdas (Smart City) melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dimana melalui pemanfaatan kemajuan teknologi komunikasi dan informasi dalam melaksanakan tugas pemerintahan akan terwujud pembaharuan berupa peningkatan kualitas pelayanan publik yang lebih responsif, akuntabel, transparan, efektif dan efisien.

B. Tujuan dan Sasaran

Tujuan OPD adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan yang merupakan jabaran dari visi dan misi pembangunan, serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis. Sesuai dengan Perubahan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang Tahun 2019-2023, tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1

Tujuan dan Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang

RENSTRA AWAL										RENSTRA PERUBAHAN											
NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	DEFINISI OPERASIONAL	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-					NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	DEFINISI OPERASIONAL	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-						
					##	##	##	##	##						2019 (T)	2020 (T)	2019 (Re)	2020 (Re)	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi		Indeks Reformasi Birokrasi		62	64	66	68	70	1	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah		Indeks Reformasi Birokrasi		62	64	51.62	52.82	54.02	55.22	56.42
		Meningkatnya kinerja pemerintahan yang responsif, efisien, efektif, transparan dan partisipatif berbasis teknologi informasi	Indeks SPBE	Berdasarkan evaluasi Kemenpan terhadap implementasi SPBE (skala 1-5)	1.86	2.65	2.7	2.85	3			Meningkatnya kinerja pemerintahan yang responsif, efisien, efektif, transparan dan partisipatif berbasis teknologi informasi	Indeks SPBE	Indeks SPBE merupakan indeks yang menggambarkan tingkat kematangan (maturity level) dari pelaksanaan SPBE di Instansi Pemerintah.	1.86	2.65	2.67	3.01	2.09	2.25	2.6
		Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik	Persentase Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik	Berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh Komisi Informasi Provinsi (skala 1-100)	71%	74%	78%	81%	84%			Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik	Persentase Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik	Berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh Komisi Informasi Provinsi (skala 1-100)	71%	74%	78.8%	80%	92.32%	93%	94%
		Tersedianya data statistik sektoral yang memenuhi prinsip satu data Indonesia	Persentase data statistik sektoral yang terpublikasi	%jumlah data statistik yang terpublikasi/target	25%	30%	32%	35%	40%			Tersedianya data statistik sektoral yang memenuhi prinsip satu data Indonesia	Persentase data statistik sektoral yang terpublikasi	%jumlah data statistik yang terpublikasi/target	25%	30%	na	33.00%	58.33%	83%	100%
										2	Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur berkelanjutan		Persentase kenaikan Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI)	Hasil survey IKM	na	na	na	1,15	1,27	1,39	1,5
												Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur kominfo	Nilai IKM Kominfo	Hasil survey IKM	na	na	na	72,03	85	86	87

Untuk mengukur keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional, setiap lembaga atau Instansi pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang mengacu pada prioritas program dan kegiatan sesuai dengan sasaran strategis dalam RPJMD dan RENSTRA Satuan Kerja Perangkat Daerah. Berdasarkan Perubahan Renstra 2019-2023, lebih lanjut Indikator Kinerja Utama pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2

**Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika
Kota Padang Panjang**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	DEFENISI OPERASIONAL	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya kinerja pemerintahan yang responsif, efisien, efektif, transparan dan partisipatif berbasis teknologi informasi	Indeks Sistikm Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	indeks yang menggambarkan tingkat kematangan (maturity level) dari pelaksanaan SPBE di Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Sesuai dengan Permenpan Nomor 59 Tahun 2020, Indeks SPBE dihitung menggunakan lembar kerja pengukuran SPBE berdasarkan 47 indikator kinerja yang meliputi 4 domain yaitu kebijakan internal terkait SPBE, tata kelola SPBE, manajemen SPBE, dan layanan SPBE.
2	Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik	Persentase Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik	Berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh Komisi Informasi Provinsi	Penilaian keterbukaan informasi publik meliputi 3 aspek yakni penyebaran questioner, penilaian website dan data dukung serta penilaian visitasi (kunjungan lapangan) yang dilakukan oleh Komisi Informasi
3	Tersedianya data statistik sektoral yang memenuhi prinsip satu data indonesia	Persentase data statistik sektoral yang terpublikasi	% jumlah data statistik yang terpublikasi/target	(jumlah OPD yang mempublikasikan data statistik melalui portal satu data)/(total jumlah OPD)*100%
4	Meningkatnya Kualitas Layanan Infrastruktur Kominfo	Nilai IKM Kominfo	Hasil survey IKM atas tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan infrastruktur TI yang disediakan Dinas Kominfo	Perhitungan nilai IKM atas survey yang dilakukan lembaga independen

C. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja sebagai bentuk komitmen atas kinerja yang terukur sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Indikator Kinerja yang disepakati dalam Perjanjian Kinerja merupakan jabaran dari pencapaian tujuan dan sasaran OPD sebagaimana telah dimuat dalam Rencana Strategis. Penetapan target dalam Perjanjian Kinerja pada dasarnya sesuai dengan Rencana Strategis, namun untuk menjaga kesinambungan dan perbaikan kinerja dari capaian pada tahun sebelumnya dapat dilakukan penyesuaian terhadap target kinerja.

Lebih lanjut ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja perubahan Dinas Kominfo tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.3

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
			Sebelum	Sesudah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya kinerja pemerintahan yang responsif, efisien, efektif, transparan dan partisipatif berbasis teknologi informasi	Indeks SPBE	2.90	2.90
2	Meningkatnya keterbukaan informasi publik	Persentase Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik	100%	100%
3	Tersedianya data statistik sektoral yang memenuhi prinsip satu data Indonesia	Persentase data statistik sektoral yang terpublikasi	100%	100%
4	Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur kominfo	Nilai IKM Kominfo	87	87

	Program	Anggaran		Keterangan
		Sebelum	Sesudah	
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3,817,035,454	3,787,485,789	
2	Informasi dan Komunikasi Publik	2,300,846,250	2,515,758,200	
3	Aplikasi Informatika	2,212,676,500	2,653,626,800	
4	Penyelenggaraan Statistik Sektoral	29,980,000	29,980,000	
5	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	11,942,000	11,937,000	

Pada Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023, terdapat 2 (dua) indikator kinerja utama yang mengalami penyesuaian target sehingga berbeda dari target yang ditetapkan dalam Perubahan Renstra. Perubahan target ini dilakukan pada indikator sasaran strategis 1 dan sasaran strategis 2 dimana untuk indeks SPBE target mengalami kenaikan dari 2,6 menjadi 2,90 dikarenakan capaian indikator ini pada tahun 2023 sudah terealisasi sebesar 2,81. Begitu juga dengan indikator persentase pemeringkatan keterbukaan informasi publik mengalami kenaikan dari target pada renstra sebesar 94 % menjadi 100% dikarenakan capaian tahun 2023 sudah terealisasi sebesar 99,92%. Sementara untuk 2 (dua) indikator sasaran strategis lainnya target tetap sesuai dengan Perubahan Renstra. Penyesuaian target kinerja ini dimaksudkan guna kesinambungan dan perbaikan kinerja selanjutnya.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA 2023

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi pemerintah. Analisis pencapaian kinerja sasaran merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023.

Metode pengukuran yang digunakan adalah metode pengukuran sederhana dengan membandingkan target kinerja dengan realisasi kinerja. Cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata capaian indikator kinerja sasaran. Prediket nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran sebagai berikut:

Tabel 3.1
Skala Pengukuran Indikator Kinerja

PRESENTASE	PREDIKET
<100%	Tidak tercapai
=100%	Tercapai/Sesuai Target
>100%	Melebihi Target

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapai kinerja yang diharapkan.

Sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan tahun 2023 pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang telah ditetapkan 4

(empat) indikator kinerja utama untuk mendukung 4 (empat) sasaran strategis OPD. Pencapaian kinerja untuk masing-masing sasaran strategis akan diuraikan lebih lanjut sebagai berikut :

A.1 Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya kinerja pemerintahan yang responsif, efisien, efektif, transparan dan partisipatif berbasis teknologi informasi.

Pengukuran capaian kinerja untuk sasaran strategis 1, Meningkatnya kinerja pemerintahan yang responsif, efisien, efektif, transparan dan partisipatif berbasis teknologi informasi pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 3.1.1
Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2023**

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET PK	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Meningkatnya kinerja pemerintahan yang responsif, efisien, efektif, transparan dan partisipatif berbasis teknologi informasi	Indeks Pemerintahan Berbasis Elektronik	2,9	2,93	113%

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Untuk mengukur perkembangan penerapan SPBE di Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama Tim Koordinasi SPBE Nasional melaksanakan Evaluasi SPBE. Pada tahun 2023, telah dilaksanakan Pemantauan SPBE dengan menggunakan instrumen sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE.

Tabel 3.1.2
Predikat Indeks SPBE

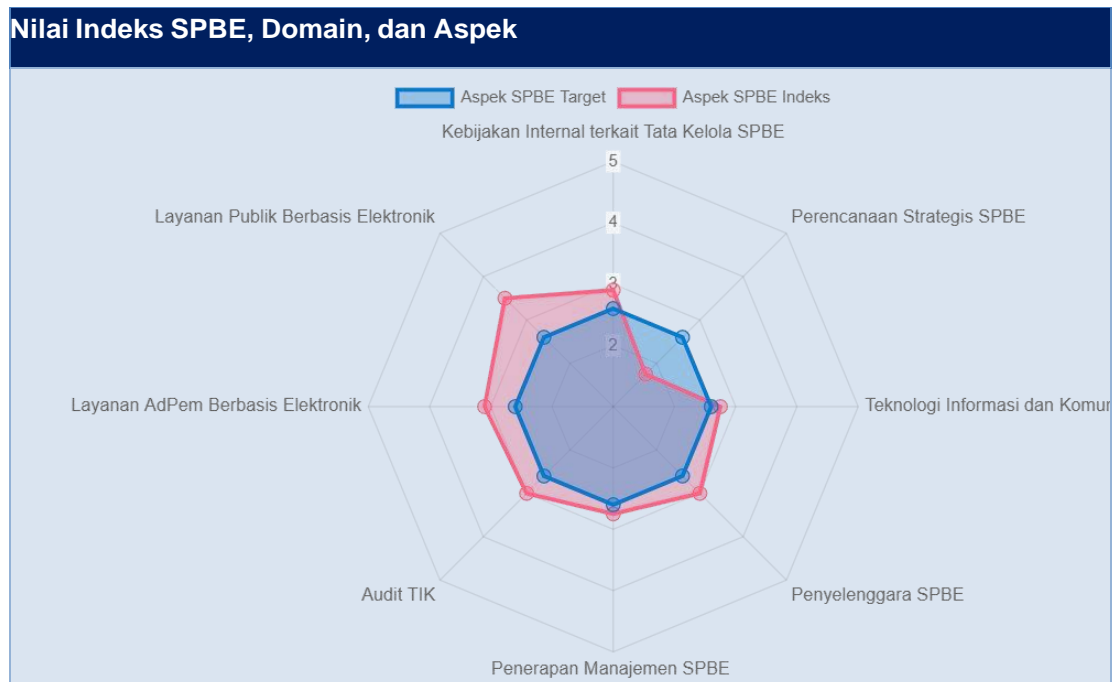
Predikat Indeks SPBE		
No	NILAI INDEKS	PREDIKAT
1	4,2 - 5,0	Memuaskan
2	3,5 - < 4,2	Sangat Baik
3	2,6 - < 3,5	Baik *)
4	1,8 - < 2,6	Cukup
5	< 1,8	Kurang

*) Target penilaian: Predikat Baik (indeks minimal 2,6)

Penerapan SPBE dinilai dengan metode tingkat kematangan SPBE yang merupakan kerangka kerja untuk mengukur derajat kematangan penerapan SPBE yang ditinjau dari kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE. Tingkat kematangan SPBE dikelompokkan atas 5 (lima) level, dimana masing-masing level menunjukkan karakteristik kematangan tertentu pada kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE.

Dari rangkaian penilaian evaluasi SPBE Kota Padang Panjang yang dilakukan mulai Bulan Juli tahun 2023 melalui kegiatan penilaian mandiri, penilaian dokumen dan penilaian interviu didapat hasil penilaian sebagaimana pada gambar dan tabel berikut.

Gambar 3.1
Hasil Penilaian Indeks SPBE Kota Padang Panjang Tahun 2023



Tabel 3.1.3
Hasil Penilaian Indeks SPBE Kota Padang Panjang Tahun 2023

Nama Indeks	Bobot	Nilai 2023
SPBE		2,93
Domain Kebijakan SPBE	13%	2,90
<i>Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE</i>	13%	2,90
Domain Tata Kelola SPBE	25%	2,40
<i>Perencanaan Strategis SPBE</i>	25%	1,75
<i>Teknologi Informasi dan Komunikasi</i>	10%	2,75
<i>Penyelenggara SPBE</i>	5%	3,00
Domain Manajemen SPBE	16,5%	2,82
<i>Penerapan Manajemen SPBE</i>	12%	2,75
<i>Audit TIK</i>	4,5%	3,00
Domain Layanan SPBE	45,5%	3,26
<i>Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik</i>	27,5%	3,10
<i>Layanan Publik Berbasis Elektronik</i>	18%	3,50

Sumber data : KemenpanRB 2024

Secara umum dari target kinerja sebesar 2,9, berdasarkan hasil evaluasi Kemenpan RB untuk tahun 2023 hasil penilaian Kota Padang Panjang terealisasi **sebesar 2,93** pada predikat **Baik** atau dengan capaian kinerja 113%. Untuk gambaran pemenuhan masing masing domain dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Domain kebijakan SPBE.

Pemenuhan domain kebijakan SPBE dengan bobot 13 % dari total penilaian SPBE, diperoleh nilai **sebesar 2,90** atau dengan predikat **baik**. Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE yang sudah dipenuhi oleh Kota Padang Panjang yang meliputi Kebijakan Internal Arsitektur SPBE, Peta Rencana SPBE, Manajemen Data, Aplikasi SPBE, Layanan Pusat Data, Layanan Jaringan Intra, Penghubung Layanan, Manajemen Keamanan Informasi, Audit TIK, Tim Koordinasi SPBE. Namun disisi lain, Kota Padang Panjang masih belum memiliki kebijakan internal yang mengatur secara komprehensif terkait dengan Layanan Pusat Data.

2. Domain Tata Kelola SPBE

Pemenuhan domain tata kelola dengan bobot 25 % dari total penilaian SPBE, diperoleh nilai **sebesar 2,40** atau dengan predikat **cukup**. Domain Tata Kelola terdiri atas Aspek Perencanaan Strategis, Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Aspek Penyelenggara SPBE. Penerapan pada Aspek Perencanaan Strategis SPBE yang sudah dipenuhi oleh Kota Padang Panjang adalah adanya dokumen Probis SPBE, namun dengan Tingkat kematangan masih sangat rendah yakni **1,75**. Hal ini dikarenakan belum adanya Arsitektur SPBE Kota Padang Panjang.

Sementara itu untuk pemenuhan Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi yang sudah dipenuhi oleh Kota Padang Panjang didapat nilai **2,75** dalam artian baik dengan adanya Dokumen Peta Rencana Pembangunan Aplikasi SPBE, Layanan Pusat Data, layanan Jaringan Intra Instansi dan Sistem Penghubung Layanan. Namun disisi lain Pembangunan Aplikasi SPBE masih mencakup sebagian.

Untuk Aspek Penyelenggara SPBE yang sudah dipenuhi oleh Kota Padang Panjang adalah dengan adanya Dokumen Peta Rencana, Tim

Koordinasi SPBE dan Kolaborasi Penerapan SPBE keseluruhan sehingga mendapat nilai 3 atau predikat baik. Namun sedikit kelemahan pada SDM yang belum memiliki sertifikat kompetensi.

3. Domain Manajemen SPBE.

Pemenuhan domain manajemen SPBE dengan bobot 16,5 % dari total penilaian SPBE, diperoleh nilai **2,83 atau dengan predikat baik**. Pada sub domain Penerapan Manajemen SPBE, Penerapan Manajemen Risiko, Penerapan Manajemen Keamanan Informasi, Penerapan Manajemen Data, Penerapan Manajemen Aset TIK, Penerapan Manajemen Pengetahuan, Penerapan Manajemen Perubahan sudah dipenuhi secara keseluruhan. Namun terkait dengan kompetensi Sumber Daya Manusia Penerapan Manajemen Layanan SPBE baru mencakup sebagian. Sehingga untuk sub domain penerapan manajemen SPBE ini diperoleh nilai sebesar 2,75 atau baik.

Sementara untuk sub domain Audit TIK diperoleh nilai 3,00 atau baik. Hal ini dikarenakan adanya pemenuhan Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE, Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE, Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE. Namun belum terdapat sertifikat auditor internal dan belum adanya proses rapat review hasil pengukuran indeks KAMI.

4. Domain Layanan SPBE

Domain ini memiliki bobot paling besar dalam penilaian SPBE, yakni sebesar 45,5 %. Berdasarkan hasil evaluasi nilai untuk domain ini diperoleh **sebesar 3,26** atau dengan predikat **baik**. Terkait dengan sub domain Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik, sudah dipenuhi oleh Kota Padang Panjang adalah adanya Layanan Perencanaan, Layanan Penganggaran, Layanan Keuangan, Layanan Pengadaan Barang dan Jasa, Layanan Kepegawaian, Layanan Kearsipan Dinamis, Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Layanan Pengawasan Internal Pemerintah, Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi, Kematangan Layanan Kinerja Pegawai, dan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik. Namun masih terdapat sedikit kelemahan terkait pengujian penetrasi test Layanan Pengelolaan Barang

Milik Negara/Daerah. Lebih lanjut sub domain ini mendapat nilai sebesar 3,10 dengan predikat baik.

Sedangkan pada sub domain Layanan Publik Berbasis Elektronik secara keseluruhan penerapan pada Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik yang sudah dipenuhi oleh Kota Padang Panjang adalah dengan adanya Layanan Data Terbuka, Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, Layanan Publik Sektor 1, 2 dan 3. Namun perlu ada peningkatan dengan pengembangan berkelanjutan Pemilihan topik tematik yang tepat dan mengena, dan melakukan cleansing terhadap aplikasi yang sudah tidak dibutuhkan. Terkait dengan layanan public berbasis elektronik ini mendapat nilai sebesar 3,50 atau predikat baik.

Tabel 3.1.4
Perbandingan Capaian Kinerja
Sasaran Srategis 1

No	Indikator Kinerja	Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023		
		Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Indeks SPBE	1,86	2,67	143	2,65	3,01	113	2,7	2,09	77	2,25	2,81	125	2,9	2,93	101

Berdasarkan perbandingan capaian kinerja untuk indikator indeks SPBE dari tahun ke tahun bahwa terjadi peningkatan dari tahun sebelumnya dan nilai realisasi melebihi nilai target yang ditetapkan. Secara umum kenaikan tersebut diperoleh karena adanya peningkatan pada aspek penyelenggaraan SPBE dan Domain Manajemen SPBE.

Tabel 3.1.5
Perbandingan Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023 dan target akhir Renstra
Sasaran Srategis 1

No	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2023	Target Akhir Renstra	% Capaian
1.	Indeks SPBE	2,93	2,6	113

Target kinerja tahun 2023 ini ditetapkan lebih tinggi dibandingkan dengan target Renstra, hal ini dikarenakan capaian kinerja untuk indikator ini pada tahun sebelumnya yang lebih dari target yang ditetapkan. Untuk nilai indeks SPBE pada akhir Renstra pada tahun 2019-2023 ditetapkan sebesar 2,6. Dengan hasil penilaian tahun 2023 sebesar 2,93 artinya capaian kinerja sebesar 113%, dengan kata lain **telah melebihi target**.

Tabel 3.1.6
Perbandingan Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023 dengan standar nasional
Sasaran Srategis 1

No	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2023	Rata-rata Nasional	% Capaian
1.	Indeks SPBE	2.93	2.50	117

Perbandingan capaian nilai SPBE Kota Padang Panjang dengan standar nasional, dalam hal ini menggunakan rata rata realisasi nilai kabupaten/kota pada tahun 2023. Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 tahun 2024 Tentang Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2023 bahwa rata rata realisasi nasional untuk kota sebesar 2,50. Dengan nilai sebesar 2,93 dapat disimpulkan bahwa indeks SPBE kota Padang Panjang sudah berada diatas rata rata nasional untuk kategori capaian indeks SPBE kota di Indonesia.

Capaian kinerja untuk \sasaran strategis *Meningkatnya kinerja pemerintahan yang responsif, efisien, efektif, transparan dan partisipatif berbasis*

teknologi informasi, didukung oleh pelaksanaan 2 (dua) Program yakni Program Aplikasi Informatika dan Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi.

Pada Program Aplikasi dan Informatika terdiri dari 1 (satu) kegiatan yaitu Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja jumlah layanan berbasis elektronik yang terintegrasi sebanyak 20 layanan dan terealisasi 100%. Kegiatan ini terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan yakni Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah. Sementara pada Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi dilaksanakan melalui kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan dirinci melalui sub kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik. Lebih lanjut terkait capaian kinerja serta realisasi anggaran untuk masing-masing program pendukung Sasaran Strategis ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1.7
Realisasi Kinerja Program Pendukung
Sasaran Strategis 1

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KINERJA		
				Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)	(6)
1	Meningkatnya kinerja pemerintahan yang responsif, efisien, efektif, transparan dan partisipatif berbasis teknologi informasi	Indeks Sistim Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	2.90	2.93	101.03%
	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Indeks Implementasi tata kelola SPBE	Indeks	2.3	2.4	104.35%
		Indeks Implementasi Layanan SPBE	Indeks	3.55	3.26	91.83%

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)	(6)
	Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	jumlah layanan berbasis elektronik yang terintegrasi	Layanan	20	20	100.00%
	Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah layanan berbasis elektronik yang terintegrasi	Layanan	20	20	100.00%
		Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	Aplikasi	20	20	100.00%
	Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah jenis infrastruktur teknologi informasi yang dikelola	jenis	7	7	100.00%
		Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya TI dan Komunikasi Pemerintah Daerah	dokumen	1	1	100.00%
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Nilai indeks KAMI	Indeks	375	222	59.20%
	Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelatihan	pelatihan	1	1	100.00%
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	jumlah peserta pelatihan	orang	24	24	100.00%
		Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	dokumen	1	1	100.00%
Rata rata Capaian			78,64%			

Berdasarkan tabel diatas, rata rata capaian kinerja program untuk sasaran strategis ini adalah sebesar 78,64 % atau tidak mencapai target. Pada Program Aplikasi dan Informatika terdapat 1 (satu) indikator yang tidak mencapai target terkait dengan layanan SPBE, dikarenakan adanya aplikasi layanan administrasi terkait pengelolaan barang milik negara/daerah yang tidak berfungsi dengan baik. Sementara pada Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi capaian kinerja indikatornya juga masih rendah, hal ini disebabkan masih rendahnya indeks Keamanan Informasi (KAMI) pemerintah Kota Padang Panjang berdasarkan hasil evaluasi BSSN (Badan Sandi dan Siber Negara) dikarenakan masih minimnya regulasi dan infrastruktur pengamanan informasi yang dimiliki kota Padang Panjang.

Dari gambaran, perbandingan dan analisa atas capaian kinerja indikator sasaran strategis, maka dapat disimpulkan bahwa terkait peningkatan capaian indeks SPBE Kota Padang Panjang terdapat beberapa faktor pendukung, antara lain sebagai berikut :

1. Peningkatan Tata Kelola SPBE terkait dengan Penyelenggaraan SPBE, dimana sudah terbentuknya Tim Koordinasi SPBE yang mengkoordinir dan berkolaborasi dalam penyelenggaraan SPBE secara terpadu di Kota Padang Panjang.
2. Peningkatan manajemen layanan SPBE dengan dilakukannya Risk Assesment SPBE serta Audit infrastruktur serta manajemen layanan SPBE sudah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan dengan Perda Kota Padang Panjang Nomor 10 Tahun 2019 tentang SPBE.
3. Peningkatan Tingkat Kematangan Layanan Publik.

Sementara itu, terdapat beberapa rekomendasi yang perlu dilakukan untuk mendapatkan capaian kinerja yang lebih baik lagi, diantaranya :

1. Peningkatan kualitas SDM TIK terkait pengelolaan, dan pengamanan informasi.
2. Penyusunan regulasi dan dokumen perencanaan terkait tata kelola SPBE khususnya penyusunan dokumen masterplan Smart City dan Arsitektur SPBE.

3. Perlunya melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terkait dengan layanan SPBE.

A.2 Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik

Keterbukaan informasi publik merupakan amanat Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 dimana setiap badan publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan. Informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik.

Indikator yang digunakan untuk mengukur sasaran strategis ini adalah Persentase Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik, yang bersumber dari hasil monitoring dan evaluasi Keterbukaan Informasi Publik yang dilakukan oleh Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat setiap tahunnya. Monev ini memiliki maksud dan tujuan untuk mengukur kepatuhan Badan Publik dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik, menilai konsisten Badan Publik memberikan layanan informasi public, mengevaluasi implementasi standar layanan informasi publik pada Badan Publik, menilai kategori kepatuhan keterbukaan informasi Badan Publik dan memberikan masukan (*feed back*) pelaksanaan keterbukaan informasi publik pada Badan Publik.

Berdasarkan rangkaian evaluasi yang dilakukan oleh Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat semenjak bulan Agustus sampai dengan November 2023, didapatkan hasil sebagai berikut :

Tabel 3.2.1
Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2023
Sasaran Strategis 2

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6
2	Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik	Persentase Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik	100%	96,90	96,90%

Berdasarkan hasil evaluasi dari Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat, Kota Padang Panjang mendapatkan nilai persentase keterbukaan informasi publik sebesar 96,90% ini sekaligus mendapat peringkat ke 2 dari 19 Kabupaten/ Kota di Sumatera Barat dengan Kualifikasi Informatif. Namun secara capaian kinerja untuk indikator ini **belum mencapai target** Perjanjian Kinerja.

Lebih lanjut hasil penilaian dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2.2
Hasil Penilaian Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2023
Sasaran Strategis 2

No	Tahapan Penilaian	Nilai	Maksimal Nilai
1	Pengisian Quesioner	10	10
2	Verifikasi Website dan Data Dukung	68	70
3	Visitasi	15	15
4	Presentasi	4,47	5
	Total Nilai		100

Sumber Data: Komisi Informasi Sumatera Barat, 2023

Dari target pada perjanjian kinerja sebesar 100%, indikator sasaran strategis ini terealisasi 96,90% atau dengan capaian baik dan kategori Informatif, Kota Padang Panjang memperoleh nilai 96,90% atau dengan predikat informatif. Target indikator pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sedikit berbeda dengan

target pada Renstra atau lebih tinggi. Hal ini dikarenakan capaian kinerja untuk indikator ini sudah melebihi target di tahun sebelumnya yakni sebesar 99,92%.

Perbandingan realisasi capaian kinerja dari tahun sebelumnya dan dengan target capaian yang ada dalam Rencana Strategis Dinas Kominfo dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.2.3
Perbandingan Capaian Kinerja
Sasaran Srategis 2

No	Indikator Kinerja	Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023		
		Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
2.	Persentase Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik	71 %	78 %	110 %	74 %	80 %	108 %	78 %	92,32 %	118 %	93 %	99,92 %	107 %	94 %	96,90 %	103 %

Dari tabel diatas terlihat bahwa capaian kinerja untuk indikator persentase pemeringkatan keterbukaan informasi publik ini meningkat setiap tahunnya melebihi target atau dalam artian sangat baik.

Tabel 3.2.4
Perbandingan Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023 dan target akhir Renstra
Sasaran Srategis 2

No	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2023	Target Akhir Renstra	% Capaian
2.	Persentase Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik	96,90%	94%	103%

Dibandingkan dengan target akhir Renstra pada akhir tahun 2023, maka realisasi kinerja untuk indikator Persentase Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik pada tahun 2023 ini sudah **melebihi target Renstra** yang ditetapkan sebesar 94% atau dengan capaian sebesar 103%.

Tabel 3.2.5
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan standar nasional
Sasaran Srategis 2

No	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2023	Standar Nasional	Capaian
1.	Persentase Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik	96,90	90	107%

Perbandingan realisasi kinerja indikator persentase peningkatan keterbukaan informasi publik dengan standar nasional tidak dapat dilakukan karena tidak tersedianya data untuk indikator ini.

Capaian kinerja untuk sasaran strategis *Meningkatnya keterbukaan informasi publik*, didukung oleh pelaksanaan . Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik dengan indikator kinerja Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik dengan target sebesar 50%. Indikator Kinerja program ini terealisasi sebesar 57 % atau dengan capaian 114 %.

Program ini terdiri dari 1 (satu) kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan 4 (empat) sub kegiatan antara lain, Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik, Pengelolaan Media Komunikasi Publik , Layanan Hubungan Media dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas. Terkait capaian kinerja serta realisasi anggaran untuk masing-masing program pendukung Sasaran Strategis ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2.6
Realisasi Kinerja Program Pendukung
Sasaran Srategis 2

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KINERJA		
				Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2	Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik	Persentase Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik	Persentase	100%	96.90%	96.90%

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)	(6)
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik		50%	57%	114.86%
	Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rata rata kunjungan masyarakat pada laman resmi kominfo padang panjang	kunjungan	85,000	243,536	286.51%
	Sub Kegiatan Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah konten videotron	konten	850	1083	127.41%
		Jumlah OPD yang sudah mengelola daftar informasi publik	OPD	23	23	100.00%
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	dokumen	1	1	100.00%
	Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah release berita mengenai informasi aktual di lingkungan pemerintah Kota Padang Panjang melalui media sosial	rilis	1000	1210	121.00%
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	dokumen	1	1	100.00%
	Sub Kegiatan Layanan Hubungan Media	Jumlah jenis media informasi pembangunan daerah	jenis	5	5	100.00%
		Jumlah pertemuan jumpa pers	kali	8	10	125.00%
		Jumlah penerbitan majalah serambi mekkah	edisi	2	2	100.00%
		Jumlah Layanan Hubungan Media	layanan	5	5	100.00%

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)	(6)
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah KIM yang aktif	kelompok	2	2	100.00%
		Jumlah pelatihan bakohumas yang diadakan	pelatihan	1	1	100.00%
		Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	dokumen	1	11	100.00%
RATA-RATA						114.86%

Berdasarkan tabel diatas, rata rata capaian kinerja program untuk sasaran strategis ini adalah sebesar 114,86% atau **melebihi target**. Sementara untuk anggaran program pendukung, realisasinya rata-rata sebesar 99,05% atau sangat baik. Dari masing masing sub kegiatan, rata-rata realisasi indikator kinerjanya melebihi target. Hal ini disebabkan sasaran ini mendapatkan perhatian yang cukup besar baik dari internal Dinas Kominfo sendiri maupun dari pimpinan dan stakeholder terkait.

Dari gambaran, perbandingan dan analisa atas capaian kinerja indikator sasaran strategis Meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik, maka dapat disimpulkan bahwa terkait pencapaian persentase pemeringkatan keterbukaan informasi publik terdapat beberapa faktor pendukung, antara lain sebagai berikut :

Adapun faktor penghambat terhadap tidak tercapainya target atas capaian kinerja tersebut dan perlu untuk segera ditindaklanjuti adalah sebagai berikut :

1. Masih belum optimalnya proses verifikasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen Daftar Informasi Publik (DIP) sebelum dipublikasikan.
2. Perlu dilakukan update dan perbaikan SOP terkait tata cara pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

3. Seringnya terjadi pergantian pengelola DIP di masing-masing OPD sehingga berdampak kepada kualitas dan ketersediaan DIP.

A.3 Sasaran Strategis 3 : Tersedianya data statistik sektoral yang memenuhi prinsip satu data indonesia sektoral

Data yang valid menjadi salah satu kunci pembangunan. Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola data Pemerintah untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan standar data, metadata, interoperabilitas data dan menggunakan kode referensi dan data induk. Hal ini merupakan penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Terkait dengan fungsinya sebagai walidata, Dinas Kominfo Kota Padang Panjang berupaya agar seluruh pengelolaan data statistik sektoral dan informasi yang dikelola dapat menerapkan prinsip Satu Data Indonesia untuk menuju tata kelola data yang lebih baik,

Pemenuhan sasaran strategis 3, Tersedianya data statistik sektoral yang memenuhi prinsip satu data indonesia pada tahun 2023 dapat terlihat pada tabel berikut ini.

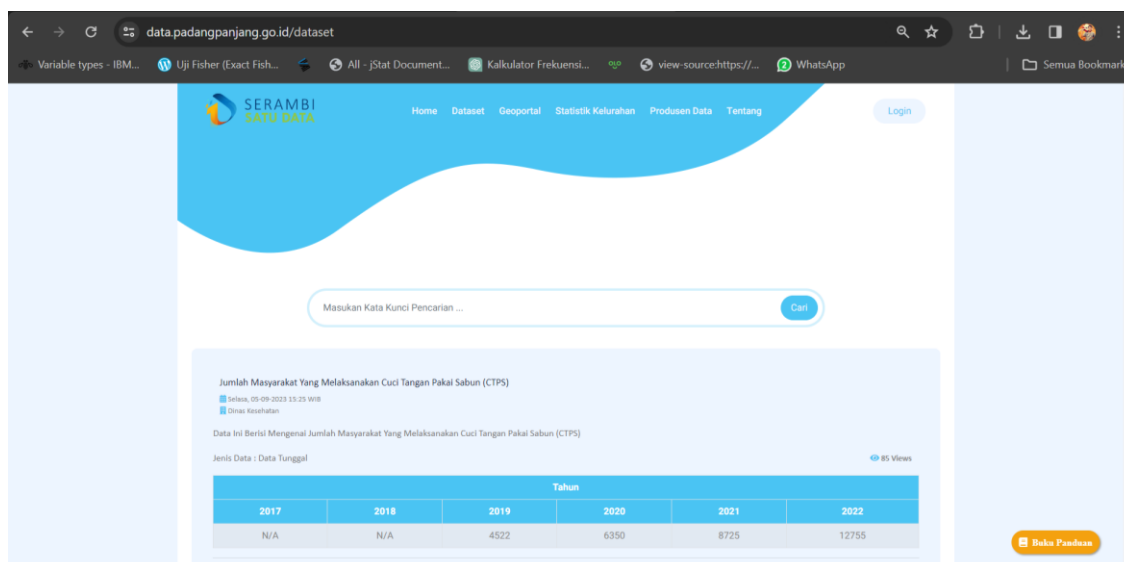
Tabel 3.3.1
Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2023
Sasaran Strategis 3

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
1	2	3	4	5	6
3	Tersedianya data statistik sektoral yang memenuhi prinsip satu data Indonesia	Persentase data statistik sektoral yang terpublikasi	100%	100%	100%

Sebagai upaya penyebarluasan data statistik, Dinas Komunikasi dan Informatika juga memiliki Portal Satu Data Kota Padang Panjang. Portal ini menjadi rujukan penyebarluasan data yang bisa dimanfaatkan oleh publik untuk berbagai keperluan. Juga, portal ini menjadi wadah berbagipakai data ke portal lainnya seperti website OPD atau Portal Satu Data Indonesia. Berdasarkan hasil evaluasi pada akhir tahun 2023 terhadap persentase jumlah OPD yang telah mempublikasikan data statistik sektoralnya melalui website data.padangpanjang.go.id. Dari 23 OPD yang ada, seluruhnya sudah mempublikasikan data statistik sektoralnya dengan capaian kinerja 100% atau **sesuai target**.

Gambar 3.3

Tampilan Portal Satu Data Kota Padang Panjang



Perbandingan realisasi capaian kinerja dari tahun sebelumnya dan dengan target capaian yang ada dalam Rencana Strategis Dinas Kominfo dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.3.2
Perbandingan Capaian Kinerja
Sasaran Strategis 3

No	Indikator Kinerja	Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023		
		Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
3.	Persentase Data Statistik Sektoral yang terpublikasi	25 %	na	na	30 %	33 %	110 %	32 %	58 %	181 %	83 %	83 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Dari tabel di atas terlihat bahwa terjadi peningkatan capaian kinerja indikator untuk 2 tahun terakhir. Hal ini menggambarkan mulai adanya kesadaran OPD akan pentingnya ketersediaan data statistik sektoral terkait tupoksi dan sudah mulai terciptanya koordinasi yang baik antara Dinas Kominfo sebagai walidata dan OPD sebagai penyedia data.

Tabel 3.3.3
Perbandingan Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023 dan target akhir Renstra
Sasaran Strategis 3

No	Indikator Kinerja	Realisasi	Target Akhir Renstra	% Capaian
3.	Persentase Data Statistik Sektoral yang terpublikasi	100%	100%	100%

Dibandingkan dengan target akhir Renstra pada akhir tahun 2023, maka realisasi kinerja untuk indikator persentase data statistik sektoral yang terpublikasi pada tahun 2023 ini sudah mencapai 100% atau **sesuai target** capaian akhir Renstra.

Tabel 3.3.4
Perbandingan Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023 dengan standar nasional

No	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2023	Standar Nasional
3.	Persentase Data Statistik Sektoral yang terpublikasi	100%	Na

Perbandingan realisasi kinerja indikator Persentase Data Statistik Sektoral yang terpublikasi tidak dapat dilakukan karena tidak ada penetapan standar skala nasional untuk indikator ini. Namun pada dasarnya penyelenggaraan statistik sektoral melalui Satu data Indonesia ini dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.

Capaian kinerja untuk sasaran strategis Tersedianya data statistik sektoral yang memenuhi prinsip Satu Data Indonesia, didukung oleh pelaksanaan Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral dengan indikator Persentase Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah sebanyak 100% dan Persentase Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun pelaporan pembangunan daerah sebanyak 100%. Untuk masing-masing indikator program ini terealisasi **sesuai target**. Program ini terdiri dari 1 (satu) kegiatan yaitu Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota dan dirinci lebih lanjut melalui 1 (satu) sub kegiatan yaitu Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral.

Lebih lanjut capaian kinerja serta realisasi anggaran untuk masing-masing program pendukung Sasaran Strategis ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3.5
Realisasi Kinerja Program Pendukung
Sasaran Strategis 3

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KINERJA		
				Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)	(6)
3	Tersedianya data statistik sektoral yang memenuhi prinsip satu data Indonesia	Persentase data statistik sektoral yang terpublikasi	Persentase	100%	100%	100%
	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Persentase	100%	100%	100%
		Persentase Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun pelaporan pembangunan daerah	Persentase	100%	100%	100%
	Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumentasi statistik sektoral yang diadakan	dokumen	3	3	100%
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah dokumentasi statistik sektoral yang diadakan	dokumen	3	3	100%
RATA-RATA						100%

Berdasarkan tabel diatas, rata rata capaian kinerja program untuk sasaran strategis ini adalah sebesar 100% atau **sesuai target**, begitu juga dengan rata-rata realisasi indikator kinerja untuk sub kegiatan sesuai dengan target.

Dari gambaran, perbandingan dan analisa atas capaian kinerja indikator sasaran strategis Tersedianya data statistik sektoral yang memenuhi prinsip Satu Data Indonesia, maka dapat disimpulkan bahwa terkait pencapaian kinerja pada sasaran strategis ini terdapat beberapa faktor pendukung, antara lain sebagai berikut :

1. Terbentuknya Walidata Pendukung oleh Walikota Padang Panjang sebagai bentuk pemberian tanggungjawab terhadap pengumpulan, pemeriksaan, dan penyebarluasan data melalui Portal Satu Data Kota Padang Panjang.
2. Terlaksananya koordinasi yang baik dan evaluasi rutin Forum Satu Data Kota Padang Panjang dan Walidata Pendukung sehingga meningkatkan partisipasi OPD dalam pengelolaan data.
3. Adanya portal satu data yang dapat dibagipakaikan dalam aspek penyelenggaraan Pemerintahan Kota Padang Panjang.

Sementara itu, masih terdapat beberapa faktor terkait lainnya yang perlu untuk ditindaklanjuti guna memaksimalkan capaian kinerja untuk sasaran strategis ini, diantaranya;

1. Perlunya peningkatan kapasitas SDM pengelola data guna menghasilkan data statistik sektoral yang berkualitas.

A.4 Sasaran Strategis 4 : Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur kominfo

Dalam mewujudkan Good Governance sebagai kerangka Reformasi Birokrasi, menuntut terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas. Untuk mengetahui seberapa jauh pelayanan public yang dilakukan oleh Dinas Kominfo terkait dengan pengelolaan infrastruktur Teknologi Informasi yang dimilikinya, maka dilakukan survei kepuasan masyarakat. Hasil survey ini menjadi salah satu indikator kinerja utama Dinas Kominfo dalam pengukuran capaian kinerja untuk

sasaran strategis 4, Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur kominfo. Pengukuran capaian kinerja untuk sasaran ini dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.4.1
Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2023

Sasaran Strategis 4 Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur kominfo

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET PK	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur kominfo	IKM	87	87,54	100,62%

Penilaian indeks ini dilakukan melalui survey yang dilakukan oleh LPPM UNAND. Survey Kepuasan Masyarakat dilakukan terhadap layanan website dan sarana dan prasarana teknologi informasi publik Dinas Kominfo Kota Padang Panjang selama tahun 2023. Dari target indikator nilai indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 87 didapat hasil sebesar 87,54 dengan capaian kinerja 100.62% atau **melebihi target**.

Hasil perhitungan SKM dalam kuesioner survey terhadap Layanan Website, Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang, didapat hasil sebagai berikut :

Tabel 3.4.2
Tabel Perhitungan Nilai SKM Layanan Website Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang

No	Unsur Pelayanan	Nilai Total Per Unsur Pelayanan	Nilai Rata-Rata Per Unsur Pelayanan	Nilai Interval Konversi (NIK)
1	Ketersediaan fasilitas informasi yang disediakan di laman web Pemerintah Kota Padang Panjang (Unsurke-1)	180	3.600	0.720

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2	Kualitas laman website yang disediakan Pemerintah Kota Padang Panjang (Unsur ke-2)	181	2.620	0.724
3	Pemanfaatan laman website Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang (Unsur ke-3)	181	3.620	0.724
4	Kesesuaian isi/informasi yang disajikan di laman website Pemerintah Kota Padang Panjang (Unsur ke-4)	182	3.640	0.728
5	Kelengkapan informasi publik yang diberikan Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang (Unsur ke-5)	181	3.620	0.724
Total		905	18.100	3.620
Total Nilai Konversi (NIK)		3.620		
Total Nilai Konversi (NIK) x 25		90.50		
Mutu Pelayanan		A		
Kinerja Pelayanan		Sangat Baik		

Berdasarkan tabel di atas, perhitungan nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) layanan Website Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang setelah dikonversi adalah sebesar 90,50 atau dengan kinerja pelayanan Sangat Baik. Penilaian tertinggi terdapat pada kesesuaian informasi yang disajikan dalam laman website dengan rata-rata nilai 91 sehingga mendapatkan penilaian memuaskan dari masyarakat. Sementara unsur terendah terlihat pada ketersediaan fasilitas informasi pada website yang belum lengkap dan masih terdapat informasi yang belum update.

Sedangkan hasil perhitungan SKM dalam kuesioner survey terhadap Layanan Wifi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang, adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4.3

Tabel Perhitungan Nilai SKM Layanan Wifi Oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang

No	Unsur Pelayanan	Nilai Total Per Unsur Pelayanan	Nilai Rata-Rata Per Unsur Pelayanan	Nilai Interval Konversi (NIK)
1	Ketersediaan sarana dan prasarana teknologi informasi public (missal: wifi) yang disediakan Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang (Unsur ke-6)	169	3.380	1.126
2	Kualitas sarana dan prasarana teknologi informasi public (misal:wifi) yang disediakan Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang (Unsur ke-7)	168	3.360	1.119
3	Pemanfaatan sarana dan prasarana teknologi informasi public (misal:wifi) yang disediakan Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang (Unsur ke-8)	171	3.420	1.139
	Tota l	508	10.160	3.383
	Total Nilai Konversi (NIK)		3.383	
	Total Nilai Konversi (NIK) x 25		84.58	
	Mutu Pelayanan		B	
	Kinerja Pelayanan		Baik	

Berdasarkan tabel diatas, setelah dilakukan perhitungan dan konversi terhadap nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) layanan wifi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang setelah dikonversi adalah sebesar 84,58 atau dengan kinerja pelayanan **Baik**. Dari hasil survey dapat disimpulkan bahwa ke 3 unsur pelayanan sudah berjalan baik, namun terdapat beberapa pendapat responden guna perbaikan layanan ini terkait dengan belum semua fasilitas publik yang disediakan akses wifi dan kualitas jaringan yang masih lambat, dan masih ada masyarakat yang tidak mengetahui fasilitas wifi terutama *smart surau*.

Dari rata-rata SKM kedua layanan tersebut, diperoleh nilai IKM Dinas Kominfo sebesar **87,54** dalam artian **sangat baik** dengan capaian kinerja melebihi target sebesar 100,62%.

Perbandingan realisasi capaian kinerja dari tahun sebelumnya dan dengan target capaian yang ada dalam Rencana Strategis Dinas Kominfo dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.4.4
Perbandingan Capaian Kinerja
Sasaran Strategis 4

No	Indikator Kinerja	Tahun 2018			Tahun 2019			Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023		
		Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur kominfo	na	na	na	na	Na	na	na	na	na	86	80,98	95%	87	87,54	100,62%

Dari tabel di atas terlihat bahwa untuk indikator ini terjadi peningkatan capaian kinerja dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Tabel 3.4.5
Perbandingan Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023 dan target akhir Renstra
Sasaran Srategis 4

No	Indikator Kinerja	Realisasi s/d Tahun 2023	Target Akhir Renstra	% Capaian
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Layanan Infrastruktur Kominfo	87,54	87	100,62%

Dibandingkan dengan target akhir Renstra pada akhir tahun 2023, maka realisasi kinerja untuk indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Layanan Infrastruktur Kominfo sudah mencapai 100,62% atau **melebihi target Renstra**.

Tabel 3.4.6

Perbandingan Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023 dengan standar nasional Sasaran Strategis 4

No	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2023	Standar Nasional
1.	Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur kominfo	87,54	na

Perbandingan realisasi kinerja indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Layanan Infrastruktur Kominfo dengan standar nasional tidak dapat dilakukan karena tidak ada penetapan standar skala nasional untuk indikator ini. Namun dengan capaian sebesar 87,54 ini dapat diartikan bahwa IKM kualitas layanan infrastruktur ini terkategori **Baik**.

Capaian kinerja untuk sasaran strategis Meningkatkan kualitas layanan infrastruktur kominfo didukung oleh pelaksanaan 1 (satu) Program yakni Program Aplikasi Informatika. Program ini terdiri dari 1 (satu) kegiatan yaitu Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja jumlah layanan berbasis elektronik yang terintegrasi sebanyak 20 layanan. Kegiatan ini terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan yakni Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah.

Lebih lanjut terkait capaian kinerja serta realisasi anggaran untuk masing-masing program pendukung Sasaran Strategis ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.4.7
Realisasi Kinerja Program Pendukung
Sasaran Srategis 4

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KINERJA		
				Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)	(6)
1	Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur kominfo	Nilai IKM Kominfo	Nilai	87	87,54	100,62%
	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Indeks Implementasi tata kelola SPBE	indeks	2.3	2.4	104.35%
		Indeks Implementasi Layanan SPBE	Indeks	3.55	3.26	91.83%
	Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	jumlah layanan berbasis elektronik yang terintegrasi	layanan	20	20	100.00%
	Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah layanan berbasis elektronik yang terintegrasi	layanan	20	20	100.00%
		Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	aplikasi	20	20	100.00%
	Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah jenis infrastruktur teknologi informasi yang terkelola	jenis	7	7	100.00%
		Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya TI dan Komunikasi Pemerintah Daerah	dokumen	1	1	100.00%
Rata rata Capaian					98.09%	

Berdasarkan tabel diatas, rata rata capaian kinerja program untuk sasaran strategis ini adalah sebesar 98.09 % atau belum mencapai target. Sub kegiatan utama yang menjadi pendukung dalam pencapaian indikator kinerja sasaran ini adalah Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah dengan indikator kinerja jumlah jenis infrastruktur kominfo yang terkelola sebanyak 7 jenis antara lain CCTV, Router, Server, Jaringan, Videotron, Radio dan Command Center. Pengelolaan dan pemeliharaan infrastruktur ini dilakukan oleh Tim dari Dinas Kominfo.

Berdasarkan gambaran, perbandingan dan analisa atas capaian kinerja indikator ini, maka dapat disimpulkan bahwa terkait peningkatan capaian IKM Infrastruktur Kominfo terdapat beberapa faktor pendukung, antara lain sebagai berikut :

1. Semakin membaiknya fasilitas, kualitas dan pemanfaatan informasi pada laman website Pemerintah Kota Padang Panjang, dengan tersedianya konten informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat.
2. Tersedianya akses internet di beberapa fasilitas umum, dalam hal ini masjid yang menerapkan program smart surau.

Meskipun berdasarkan hasil survey kepuasan masyarakat untuk layanan infrastruktur kominfo cukup baik, terdapat beberapa rekomendasi yang dihimpun dari pendapat karesponden terhadap perbaikan layanan ini kedepan , antara lain :

1. Maintenance dan peningkatan kapasitas bandwidth agar dapat menunjang program smart city.
2. Menyajikan informasi yang lebih lengkap dan up to date pada laman website pemerintah kota Padang Panjang.

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang maka diperlukan Sumber Daya yang memadai, berupa :

- Sumber Daya Manusia yang kompeten
- Sumber Dana yang mencukupi
- Sarana dan Prasarana yang memadai

Terkait efisiensi atas sumber daya yang tersedia dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 3.5
Efisiensi Atas Sumber Daya Yang Tersedia

Kondisi Ideal	Kondisi Saat Ini	Kekurangan/ Kelebihan	Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)
Tersedianya SDM TIK yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan	Ketidakseimbangan antara kualitas dan kuantitas SDM TIK	Kondisi SDM TIK didominasi oleh Tenaga Harian Lepas dan terbatasnya peningkatan kompetensi yang tersedia bagi SDM TIK	Melakukan analisis dan evaluasi jabatan guna penambahan formasi ASN dan memfasilitasi SDM TIK yang ada untuk mengikuti Bimtek

(1)	(2)	(3)	(4)
Tersedianya Anggaran yang mencukupi untuk pelaksanaan kegiatan	Anggaran yang tersedia masih sangat terbatas karena mengalami refocussing	Terbatasnya anggaran mempengaruhi pencapaian target kinerja dikarenakan sub kegiatan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya	Membuat perencanaan anggaran sesuai dengan prioritas kinerja
Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai	Masih terbatasnya infrastruktur TIK yang tersedia	Terbatasnya Sarana dan Prasarana TIK mempengaruhi capaian kinerja dan pelayanan	Membuat perencanaan anggaran guna pemenuhan infrastruktur TIK

B. Realisasi Anggaran

Realisasi pencapaian anggaran kinerja keuangan pada tahun 2023 merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator keuangan yang telah ditetapkan dalam dokumen rencana kerja, pengukuran tingkat pencapaian kinerja keuangan didasarkan data hasil pengukuran kinerja keuangan. Melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA setelah perubahan) sebesar Rp. 8.998.787.789,- Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang melaksanakan 5 (lima) program, 8 (delapan) kegiatan dan 19 (Sembilan belas) sub kegiatan selama tahun 2023 dengan realisasi keuangan sebesar Rp.8.685.335.425 atau mencapai 96,52%. Adapun rincian realisasi anggaran tersebut seperti terdapat dalam tabel berikut

Tabel 3.6
Realisasi Anggaran

NO	PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	8,956,870,789	8,649,692,500	96.57%
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3,787,485,789	3,700,398,368	97.70%
<i>A</i>	<i>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>3,025,943,239</i>	<i>2,978,769,930</i>	<i>98.44%</i>
1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan	3,025,943,239	2,978,769,930	98.44%
<i>B</i>	<i>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>309,747,350</i>	<i>306,206,798</i>	<i>98.86%</i>
1	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor	8,141,000	8,073,000	99.16%
2	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	21,103,900	21,041,000	99.70%
3	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15,023,450	12,574,850	83.70%

NO	PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE
4	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	265,479,000	264,517,948	99.64%
C	<i>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	306,318,400	286,957,540	93.68%
1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	110,000,000	99,559,288	90.51%
2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	196,318,400	187,398,252	95.46%
D	<i>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	145,476,800	128,464,100	88.31%
1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	82,388,800	77,208,000	93.71%
2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	4,780,000	2,422,100	50.67%
3	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	31,868,000	31,734,000	99.58%
4	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	26,440,000	17,100,000	64.67%
II	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2,515,758,200	2,491,833,598	99.05%
E	<i>Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i>	2,515,758,200	2,491,833,598	99.05%
1	Sub Kegiatan Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	268,804,500	254,945,877	94.84%
2	Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	359,866,600	354,800,132	98.59%
3	Sub Kegiatan Layanan Hubungan Media	1,883,087,100	1,878,543,839	99.76%
4	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	4,000,000	3,543,750	88.59%

NO	PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE
III	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	2,653,626,800	2,457,460,534	92.61%
E	Kegiatan Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2,653,626,800	2,457,460,534	92.61%
1	Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	298,076,800	267,355,002	89.69%
2	Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	2,355,550,000	2,190,105,532	92.98%
	URUSAN STATISTIK	29,980,000	24,157,000	80.58%
IV	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	29,980,000	24,157,000	80.58%
F	Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	29,980,000	24,157,000	80.58%
1	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	29,980,000	24,157,000	80.58%
	URUSAN PERSANDIAN	11,937,000	11,485,875	96.22%
V	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	11,937,000	11,485,875	96.22%
G	Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	11,937,000	11,485,875	96.22%
1	Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	11,937,000	11,485,875	96.22%
	Total	8,998,787,789	8,685,335,375	96.52%

Terkait dengan capaian kinerja keuangan, dengan realisasi mencapai 96,52% atau dengan predikat kinerja Sangat Baik terdapat efisiensi belanja pada tahun 2023 sebesar 3,48 %, dari total anggaran yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan akuntabilitas kinerja telah terjadi efisiensi, yaitu tercapainya target yang telah ditentukan akan tetapi terdapat penghematan anggaran terutama dari belanja pemeliharaan infrastruktur teknologi informasi.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

LKjIP ini disusun sebagai salah satu bentuk pertanggung jawaban tertulis atas asas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) dan sekaligus memberikan gambaran dan evaluasi kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang selama Tahun Anggaran 2023.

Berdasarkan evaluasi kinerja dan analisa, diperoleh gambaran mengenai pencapaian kinerja sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang pada tahun 2023 sebagai berikut:

1. Pencapaian sasaran strategis melalui 4 (empat) indikator kinerja utama pada tahun 2023 sangat baik, dimana jika dibandingkan dengan target akhir Perubahan Renstra Kominfo tahun 2019-2023 seluruhnya sudah mencapai target, namun jika dibandingkan dengan target sesuai dengan perjanjian kinerja dari (empat) sasaran strategis 3 (tiga) indikator sudah mencapai bahkan melampaui target, sementara 1 (satu) indikator belum mencapai target. Hal ini disebabkan penyesuaian berupa penambahan target pada perjanjian kinerja karena adanya peningkatan capaian kinerja pada tahun sebelumnya.
2. Terkait dengan capaian program, dari pelaksanaan 5 (lima) program, 8 (delapan) kegiatan dan 19 (sembilan belas) sub kegiatan selama tahun 2023 rata-rata terealisasi dengan baik. Untuk pencapaian program dari 5 (lima) program hanya 1 (satu) program yaitu Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi yang memiliki capaian cukup terkait dengan hasil penilaian indeks Keamanan Informasi (KAMI) yang rendah dikarenakan keterbatasan infrastruktur pengamanan informasi yang dimiliki Pemerintah Kota Padang Panjang. Sementara untuk 4 (empat) program lainnya dapat terealisasi sesuai target.
3. Tingkat Realisasi anggaran pada tahun 2023 cukup tinggi, dimana dari anggaran perubahan sebesar Rp. 8.998.787.789,- terealisasi sebesar

Rp.8.685.335.425 atau mencapai 96,52%. Adapun sisa lebih perhitungan anggaran berasal dari sisa didominasi adanya efisiensi pelaksanaan kegiatan dan sisa belanja pemeliharaan infrastruktur.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan sebelumnya, masih terdapat beberapa hal yang menjadi rekomendasi untuk ditindaklanjuti guna perbaikan capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang di tahun selanjutnya, diantaranya:

1. Peningkatan kualitas SDM TIK terkait pengelolaan, dan pengamanan informasi.
2. Penyusunan regulasi dan dokumen perencanaan terkait tata kelola SPBE khususnya penyusunan dokumen masterplan Smart City dan Arsitektur SPBE.
3. Perlunya melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terkait dengan layanan SPBE.
4. Peningkatan kapasitas SDM OPD terkait publikasi informasi yang berasal di media sosial maupun website.
5. Peningkatan kapasitas SDM pengelola data guna menghasilkan data statistik sektoral yang berkualitas.
6. Maintenance dan peningkatan kapasitas bandwidth agar dapat menunjang program smart city.
7. Menyajikan informasi yang lebih lengkap dan up to date pada laman website pemerintah kota Padang Panjang.

Padang Panjang, Desember 2023

**Kepala Dinas Komunikasi dan
Informatika Kota Padang Panjang**



Drs. AMPERA, SH.M.Si

NIP. 196810703 198203 1 00

LAMPIRAN:

**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2023**



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Prof. Dr. Hamka No. 87 Telp./Fax (0752) 82815 Padang Panjang 27114
Email : kominfo.kotapadangpanjang@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabilitas serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. AMPERA, SH. M. Si
Jabatan : KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA PADANG PANJANG

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : SONNY BUDAYA PUTRA
Jabatan : PJ. WALIKOTA PADANG PANJANG

Selaku Atasan Langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA
PJ. WALIKOTA PADANG PANJANG

SONNY BUDAYA PUTRA

Padang Panjang, 1 November 2023

PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA
KOTA PADANG PANJANG


Drs. AMPERA, SH. M. Si
NIP. 19680101 199803 1 010

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PADANG PANJANG

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
			Sebelum	Sesudah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya kinerja pemerintahan yang responsif, efisien, efektif, transparan dan partisipatif berbasis teknologi informasi	Indeks SPBE	2.90	2.90
2	Meningkatnya keterbukaan informasi publik	Persentase Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik	100%	100%
3	Tersedianya data statistik sektoral yang memenuhi prinsip satu data Indonesia	Persentase data statistik sektoral yang terpublikasi	100%	100%
4	Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur kominfo	Nilai IKM Kominfo	87	87

	Program	Anggaran		Keterangan
		Sebelum	Sesudah	
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3,817,035,454	3,787,485,789	
2	Informasi dan Komunikasi Publik	2,300,846,250	2,515,758,200	
3	Aplikasi Informatika	2,212,676,500	2,653,626,800	
4	Penyelenggaraan Statistik Sektoral	29,980,000	29,980,000	
5	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	11,942,000	11,937,000	


PJ. WALIKOTA PADANG PANJANG
SONNY BUDAYA PUTRA

Padang Panjang, 1 November 2023
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA PADANG PANJANG

Drs. AMPERA, SH. M.Si
NID. 19680101 199803 1 010

**PENGUKURAN KINERJA
PER TRIWULAN
TAHUN 2023**

PENGUKURAN KINERJA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PADANG PANJANG
TRIWULAN I TAHUN 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Kinerja Pada				Realisasi s/d Triwulan ini	% Capaian	Permasalahan	Solusi
				I	II	III	IV				
1	Meningkatnya kinerja pemerintahan yang responsif, efisien, efektif, transparan dan partisipatif berbasis teknologi informasi	Indeks SPBE	2.90	-	-	-	-	-	Pengukuran baru akan dilaksanakan pada bulan Juli	mempersiapkan bahan terkait	
2	Meningkatnya keterbukaan informasi publik	Persentase Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik	100%	-	-	-	-	-	Pengukuran baru akan dilaksanakan pada triwulan III	mempersiapkan bahan terkait	
3	Tersedianya data statistik sektoral yang memenuhi prinsip satu data indonesia	Persentase data statistik sektoral yang terpublikasi	100%	-	-	-	-	-	Pengukuran baru akan dilaksanakan pada triwulan III	mempersiapkan bahan terkait	
4	Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur kominfo	Nilai IKM Kominfo	87	-	-	-	-	-	Pengukuran baru akan dilaksanakan pada triwulan III	mempersiapkan bahan terkait	

No	Program dan Kegiatan	Pagu (Rp)	Triwulan I		Ket
			Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3,817,035,454	596,766,770	15.63%	
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3,042,844,904	464,511,237	15.27%	
	<i>Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	3,042,844,904	464,511,237	15.27%	
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	329,835,350	60,953,140	18.48%	
	<i>Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>	8,141,000	1,181,000	14.51%	
	<i>Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i>	21,103,900	5,396,000	25.57%	
	<i>Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>	15,023,450	1,683,200	11.20%	
	<i>Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	285,567,000	52,692,940	18.45%	
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	298,878,400	53,393,393	17.86%	
	<i>Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	110,000,000	25,106,305	22.82%	
	<i>Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	188,878,400	28,287,088	14.98%	
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	145,476,800	17,909,000	12.31%	
	<i>Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</i>	82,388,800	16,704,000	20.27%	

	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	4,780,000	-	0.00%	
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	31,868,000	-	0.00%	
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	26,440,000	1,205,000	4.56%	
2	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2,300,846,250	412,912,882	17.95%	
	Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2,300,846,250	412,912,882	17.95%	
	Sub Kegiatan Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	251,880,900	43,311,972	17.20%	
	Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	507,310,400	43,609,816	8.60%	
	Sub Kegiatan Layanan Hubungan Media	1,513,251,200	325,991,094	21.54%	
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	28,403,750	-	0.00%	
3	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	2,212,676,500	482,710,010	21.82%	
	Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2,212,676,500	482,710,010	21.82%	
	Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	310,113,600	43,132,156	13.91%	
	Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	1,902,562,900	439,577,854	23.10%	
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	29,980,000	-	0.00%	
	Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	29,980,000	-	0.00%	
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	29,980,000	-	0.00%	
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	11,942,000	1,968,750	16.49%	
	Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	11,942,000	1,968,750	16.49%	
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	11,942,000	1,968,750	16.49%	

Padang Panjang, 10 April 2023

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kota Padang Panjang



Dr. AMPERA, SH, M.Si
NIP. 19680101 199803 1 010

NOTULEN RAPAT

- Hari/Tanggal : Senin, 10 April 2023
- Tempat : Ruang Rapat Dinas Kominfo
- Waktu : 09.00 WIB s.d. selesai
- Pimpinan Rapat : Kadis Kominfo Kota Padang Panjang
- Peserta : ASN di lingkungan Dinas Kominfo Kota Padang Panjang
- Acara : Rapat Evaluasi Kinerja Dinas Kominfo Triwulan I Tahun 2023.
- Isi Rapat : 1. Rapat membahas tentang evaluasi kinerja Dinas Kominfo pada Triwulan I Tahun 2023 sesuai dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra dan tertuang dalam Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang
2. Berdasarkan hasil paparan masing masing bidang, maka untuk pencapaian kinerja masing masing Indikator Kinerja Utama (IKU) dapat dijelaskan sebagai berikut :
- Indikator Indeks SPBE (Sistim Pemerintahan Berbasis Elektronik) masih belum bisa diukur dikarenakan pengukuran ini terkait dengan penjadwalan dari Menpan. Sesuai informasi untuk tahun ini penilaian akan dilakukan mulai bulan Juli.
 - Indikator persentase pemeringkatan keterbukaan informasi publik juga masih belum bisa diukur dikarenakan pengukuran ini terkait dengan jadwal assesment dari Komisi Informasi selaku pihak yang berwenang untuk melakukan evaluasi. Dimana pada awalnya dijadwalkan akan dilaksanakan pada Triwulan III seperti penjadwalan tahun lalu.
 - untuk indikator persentase data statistik sektoral yang terpublikasi, penilaian akan dimulai pada triwulan III.
 - Indikator Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat juga belum bisa diperoleh hasil pengukurannya karena menunggu jadwal pelaksanaan dari Bagian Oganisasi Setdako Padang Panjang yang menyelenggarakannya bekerjasama dengan LPPM Unand.
3. Jadi secara keseluruhan, pengukuran kinerja belum tersedia untuk triwulan I ini, namun proses untuk menyiapkan bahan dan kelengkapan pengukuran kinerja sudah dimulai oleh masing masing bidang dengan mempedomani hasil evaluasi dar tahun sebelumnya.
4. Secara rata-rata realisasi kinerja pada triwulan ini sudah mencapai 20% dan realisasi keuangan sebesar 1.494.358.412 atau sebesar 17,85 %. Rendahnya realisasi keuangan ini sebagian besar disebabkan belum terealisasinya beberapa belanja modal yang cukup besar terkait kerjasama media dan langganan internet.

5. Selanjutnya berdasarkan berbagai kondisi di atas, Kadis mengingatkan masing masing pejabat terkait untuk mengupayakan pemenuhan kinerja sesuai target masing-masing dan merealisasikan kegiatan yang masih tertunda.

Demikian Notulen rapat ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Mengetahui :

Notulis,

Kepala Dinas Kominfo Kota Padang Panjang,

Perencana Ahli Muda
Dinas Kominfo Kota Padang Panjang,



Drs. AMPERA, SH, .Si
19680101 199803 1 010



VITRIYENNITA, SH
NIP. 198201717 200802 2 001

DAFTAR HADIR RAPAT

DAFTAR HADIR				
Acara		: Rapat Evaluasi Kinerja TW I		
Hari/ Tanggal		: Senin / 20 April 2023		
Tempat		: Dinas Kominfo Padang Panjang		
NO	NAMA	L/P	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Amper Salim	✓	Kadis Kominfo	[Signature]
2	Burhan Candia	✓	Staf	[Signature]
3	Maryulir	✓	Kabid Ur.	[Signature]
4	YUVALIANDA	✓		[Signature]
5	Viki Yenni	✓	Asy. Perencana	[Signature]
6	DINA HUWATI	✓	FSW	[Signature]
7	Ehi Nuriaty	✓	Staf	[Signature]
8	TERI PUTRA	✓		[Signature]
9	Rosi	✓	Staf	[Signature]
10	Harry Surtio	✓	IKP	[Signature]
11	Tuli Ady	✓	IKP	[Signature]
12	Dany Syah	✓	Staf	[Signature]
13	Nofri RUIA	✓	Staf	[Signature]
14	Fas Suci Rahman	✓	Staf	[Signature]
15	BUD LANA	✓	Staf	[Signature]
16	Juan Saputra	✓	Staf	[Signature]
17	IRWAN MANSUR	✓	Staf	[Signature]
18	Ben Rahmatullah	✓	Staf	[Signature]
19	Harri Azziz Reza	✓	Staf	[Signature]
20	Ivni Hyantara	✓	Kamling Logistik	[Signature]
21				
22				
23				
24				
25				

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kota Padang Panjang
[Signature]
Drs. AMBERA, SH, M.Si
NIP. 19680111 199803 1 010

FOTO RAPAT



PENGUKURAN KINERJA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PADANG PANJANG
TRIWULAN II TAHUN 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Kinerja Pada				Realisasi s/d Triwulan ini	% Capaian	Permasalahan	Solusi
				I	II	III	IV				
1	Meningkatnya kinerja pemerintahan yang responsif, efisien, efektif, transparan dan partisipatif berbasis teknologi informasi	Indeks SPBE	2.90	-	-				0%	Penilaian SPBE tahap awal baru akan dilaksanakan pada bulan Juli	mempersiapkan bahan terkait penilaian self assesment pada tanggal 16 Juli 2023
2	Meningkatnya keterbukaan informasi publik	Persentase Pemingkatan Keterbukaan Informasi Publik	100%	-	-				0%	Pengukuran baru akan dilaksanakan pada triwulan III	mempersiapkan bahan terkait
3	Tersedianya data statistik sektoral yang memenuhi prinsip satu data indonesia	Persentase data statistik sektoral yang terpublikasi	100%	-	100%			100%	100%		
4	Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur kominfo	Nilai IKM Kominfo	87	-	-				0%	Pengukuran baru akan dilaksanakan pada triwulan III	mempersiapkan bahan terkait

No	Program dan Kegiatan	Pagu (Rp)	Triwulan II		Ket
			Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3,817,035,454	1,956,740,716	51.26%	
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3,042,844,904	1,600,801,817	52.61%	
	<i>Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	3,042,844,904	1,600,801,817	52.61%	
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	329,835,350	147,301,376	44.66%	
	<i>Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>	8,141,000	3,941,000	48.41%	
	<i>Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i>	21,103,900	11,396,000	54.00%	
	<i>Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>	15,023,450	6,680,800	44.47%	
	<i>Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	285,567,000	125,283,576	43.87%	
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	298,878,400	131,346,323	43.95%	
	<i>Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	110,000,000	49,193,603	44.72%	
	<i>Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	188,878,400	82,152,720	43.50%	
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	145,476,800	77,291,200	53.13%	
	<i>Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</i>	82,388,800	38,901,000	47.22%	
	<i>Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>	4,780,000	76,200	1.59%	
	<i>Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</i>	31,868,000	31,734,000	99.58%	

	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	26,440,000	6,580,000	24.89%
2	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2,300,846,250	1,006,480,077	43.74%
	Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2,300,846,250	1,006,480,077	43.74%
	Sub Kegiatan Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	251,880,900	107,554,503	42.70%
	Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	507,310,400	120,919,040	23.84%
	Sub Kegiatan Layanan Hubungan Media	1,513,251,200	778,006,534	51.41%
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	28,403,750	-	0.00%
3	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	2,212,676,500	889,590,554	40.20%
	Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2,212,676,500	889,590,554	40.20%
	Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	310,113,600	114,689,390	36.98%
	Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	1,902,562,900	774,901,164	40.73%
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	29,980,000	18,877,500	62.97%
	Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	29,980,000	18,877,500	62.97%
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	29,980,000	18,877,500	62.97%
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	11,942,000	3,568,750	29.88%
	Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	11,942,000	3,568,750	29.88%
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	11,942,000	3,568,750	29.88%

Padang Panjang, 6 Juli 2023
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kota Padang Panjang



Drs. AMPERA, SH, M.Si
NIP. 19680101 199803 1 010

NOTULEN RAPAT

- Hari/Tanggal : Kamis, 6 Juli 2023
- Tempat : Ruang Rapat Dinas Kominfo
- Waktu : 09.00 WIB s.d. selesai
- Pimpinan Rapat : Kadis Kominfo Kota Padang Panjang
- Peserta : ASN di lingkungan Dinas Kominfo Kota Padang Panjang
- Acara : Rapat Evaluasi Kinerja Dinas Kominfo Triwulan II Tahun 2023.
- Isi Rapat :
1. Rapat membahas tentang evaluasi kinerja Dinas Kominfo pada Triwulan II Tahun 2023 sesuai dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra dan tertuang dalam Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang
 2. Berdasarkan hasil paparan masing masing bidang, maka untuk pencapaian kinerja masing masing Indikator Kinerja Utama (IKU) dapat dijelaskan sebagai berikut :
 - a. Indikator Indeks SPBE (Sistim Pemerintahan Berbasis Elektronik) masih belum bisa diukur dikarenakan penilaian tahap awal berupa self assesment untuk indikator ini baru akan dilaksanakan pada tanggal 16 Juli mendatang, dan saat ini sedang dalam proses mengumpulkan bahan terkait
 - b. Indikator persentase pemeringkatan keterbukaan informasi publik juga masih belum bisa diukur dikarenakan pengukuran ini terkait dengan jadwal assesment dari Komisi Informasi selaku pihak yang berwenang untuk melakukan evaluasi. Dimana pada awalnya dijadwalkan akan dilaksanakan pada Triwulan III seperti penjadwalan tahun lalu.
 - c. untuk indikator persentase data statistik sektoral yang terpublikasi, sesuai dengan hasil evaluasi pada triwulan III ini sudah mencapai target sebesar 100%.
 - d. Indikator Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat juga belum bisa diperoleh hasil pengukurannya karena menunggu jadwal pelaksanaan dari Bagian Organisasi Setdako Padang Panjang yang menyelenggarakannya bekerjasama dengan LPPM Unand.
 3. Secara rata-rata realisasi kinerja pada triwulan ini dengan target sebesar 60% terealisasi sebesar sudah mencapai 58% atau capaian kinerja sebesar 97%. Belum tercapainya target kinerja pada bulan ini disebabkan belum terealisasinya kegiatan pelatihan Bakohumas dan pembinaan KIM terkait dengan refocusing anggaran pada sub kegiatan tersebut.
 4. Untuk realisasi keuangan dari target sebesar 64,14% baru terealisasi sebesar 48,50% atau dengan capaian kinerja sebesar 75 %. Rendahnya realisasi keuangan ini sebagian besar disebabkan belum terealisasinya beberapa belanja modal yang cukup besar terkait kerjasama media dan langganan internet karena bukti kelengkapan pembayaran belum didapatkan.

5. Selanjutnya berdasarkan berbagai kondisi di atas, Kadis mengingatkan masing masing pejabat terkait untuk mengupayakan pemenuhan kinerja sesuai target masing-masing dan merealisasikan kegiatan yang masih tertunda.

Demikian Notulen rapat ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Mengetahui :

Notulis,

Kepala Dinas Kominfo Kota Padang Panjang

Perencana Ahli Muda
Dinas Kominfo Kota Padang Panjang,



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Vitri Yennita', is written on the document.

Drs. AMPERA, SH., Si
19680101 199803 1 010

VITRI YENNITA, SH
NIP. 198201717 200802 2 001

DAFTAR HADIR RAPAT

DAFTAR HADIR

KEGIATAN : Rapat Evaluasi Kinerja Triwulan II
 HARI/TGL : Kamis, 6 Juli 2023
 TEMPAT : Dinos Kominfo

NO	NAMA	JABATAN	JENIS KELAMIN		TANDA TANGAN
			L	P	
1	Angga RL	Paes	✓		1
2	Ross	Staf		✓	2
3	Atipati Ape	Kabiro - 260V	✓		3
4	Dina Muncefi			✓	4
5	Busmar Candu	aku'	✓		5
6	Eny Supark	bidai		✓	6
7	Harry Kulisih	IKel	✓		7
8	Dary Saputra	Staf	✓		8
9	Dia Rahimnillah	Staf		✓	9
10	Azizy Laksana	IKel Site	✓		10
11	Vita Yenny	Pencanaan		✓	11
12	Harri Apri Reza	Staf	✓		12
13	Elni Novanty	Staf		✓	13
14	Ivni Supriatna	Kamang Unifony	✓		14
15	TEJI PRATA	OMF	✓		15
16					16
17					17
18					18
19					19
20					20
21					21
22					22
23					23
24					24
25					25

FOTO RAPAT



PENGUKURAN KINERJA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PADANG PANJANG
TRIWULAN III TAHUN 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi s/d Triwulan ini	% Capaian	Permasalahan	Solusi
				I	II	III	IV				
1	Meningkatnya kinerja pemerintahan yang responsif, efisien, efektif, transparan dan partisipatif berbasis teknologi informasi	Indeks SPBE	2.90	-	-	-	-	-	0%	Perlu dilakukan pengelolaan dan tertib administrasi dokumen SPBE, kegiatan pendukung untuk penambah nilai SPBE belum tersedia terutama arsitektur SPBE	penyusunan arsitektur SPBe dilakukan secepatnya, melakukan evaluasi kebijakan SPBE kota secara berkala
2	Meningkatnya keterbukaan informasi publik	Persentase Pemingkatan Keterbukaan Informasi Publik	100%	-	-	-	-	-	0%	Persiapan penilaian akhir monev KIP tahapan visitasi dan presentasi pada triwulan IV	mempersiapkan bahan terkait
3	Tersedianya data statistik sektoral yang memenuhi prinsip satu data indonesia	Persentase data statistik sektoral yang terpublikasi	100%	-	100%	100%	-	100%	100%		
4	Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur kominfo	Nilai IKM Kominfo	87	-	-	-	-	-	0%	Hasil Survey kepuasan masyarakat yang sudah dilaksanakan pada bulan september baru keluar pada triwulan IV	Koordinasi dan konsolidasi dengan pihak surveyor terkait hasil survey

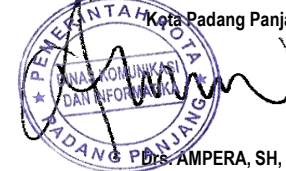
No	Program dan Kegiatan	Pagu (Rp)	Triwulan III		Ket
			Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3,817,035,454	2,796,306,396	73.26%	
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3,042,844,904	2,286,917,017	75.16%	
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3,042,844,904	2,286,917,017	75.16%	
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	329,835,350	213,344,409	64.68%	
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8,141,000	5,308,000	65.20%	
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	21,103,900	16,551,500	78.43%	
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15,023,450	8,013,100	53.34%	
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	285,567,000	183,471,809	64.25%	
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	298,878,400	200,399,770	67.05%	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	110,000,000	74,731,418	67.94%	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	188,878,400	125,668,352	66.53%	
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	145,476,800	95,645,200	65.75%	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	82,388,800	55,613,000	67.50%	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	4,780,000	173,200	3.62%	

	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	31,868,000	31,734,000	99.58%	
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	26,440,000	8,125,000	30.73%	
2	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2,300,846,250	1,498,749,093	65.14%	
	Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2,300,846,250	1,498,749,093	65.14%	
	Sub Kegiatan Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	251,880,900	179,778,883	71.37%	
	Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	507,310,400	191,143,060	37.68%	
	Sub Kegiatan Layanan Hubungan Media	1,513,251,200	1,125,267,775	74.36%	
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	28,403,750	2,559,375	9.01%	
3	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	2,212,676,500	1,460,571,066	66.01%	
	Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2,212,676,500	1,460,571,066	66.01%	
	Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	310,113,600	178,246,624	57.48%	
	Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	1,902,562,900	1,282,324,442	67.40%	
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	29,980,000	18,877,500	62.97%	
	Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	29,980,000	18,877,500	62.97%	
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	29,980,000	18,877,500	62.97%	
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	11,942,000	3,938,875	32.98%	
	Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	11,942,000	3,938,875	32.98%	
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	11,942,000	3,938,875	32.98%	

Padang Panjang, 4 Oktober 2023

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

Kota Padang Panjang



Drs. AMPERA, SH, M.Si

NIP. 19680101 199803 1 010

NOTULEN RAPAT

- Hari/Tanggal : Selasa, 3 Oktober 2023
- Tempat : Ruang Rapat Dinas Kominfo
- Waktu : 09.00 WIB s.d. selesai
- Pimpinan Rapat : Kadis Kominfo Kota Padang Panjang
- Peserta : ASN di lingkungan Dinas Kominfo Kota Padang Panjang
- Acara : Rapat Evaluasi Kinerja Dinas Kominfo Triwulan III Tahun 2023.
- Isi Rapat : 1. Rapat membahas tentang evaluasi kinerja Dinas Kominfo pada Triwulan III Tahun 2023 sesuai dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra dan tertuang dalam Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang
2. Berdasarkan hasil paparan masing masing bidang, maka untuk pencapaian kinerja masing masing Indikator Kinerja Utama (IKU) dapat dijelaskan sebagai berikut :
- a. Indikator Indeks SPBE (Sistim Pemerintahan Berbasis Elektronik)): Capaian kinerja triwulan III untuk indikator ini masih 0% dikarenakan hasil penilaian dari Kemenpan RB pada baru dilaksanakan pada tanggal 16 Juli lalu . Terkait hasil evaluasi internal untuk indikator perlu dilakukan pengelolaan dan tertib administrasi dokumen SPBE, penyusunan arsitektur SPBe dilakukan secepatnya, dan melakukan evaluasi kebijakan SPBE kota secara berkala. Hasil penilaian akan diumumkan oleh Kemenpan RB pada TW IV.
 - b. Indikator persentase pemeringkatan keterbukaan informasi public: capaian kinerja untuk indikator ini masih 0% dikarenakan tahapan penilaian monev KIP dari kominsi informasi provinsi belum selesai dilaksanakan dan baru pada tahapan penilaian website yang sudah dilakukan pada triwulan II. Selanjutnya pada triwulan IV akan dilaksanakan Visitasi ke Dinas Kominfo Kota Padang Panjang dan jika lolos kategori yang dimaksud akan dilanjutkan ke tahapan presentasi. Tindak lanjut yang akan dilaksanakan dalam menyikapi tahapan penilaian selanjutnya adalah dengan menyiapkan kelengkapan dan koordinasi yang intensif dengan PPID pelaksana (OPD).

- c. untuk indikator persentase data statistik sektoral yang terpublikasi, sesuai dengan hasil evaluasi pada triwulan III ini sudah mencapai target sebesar 100%. Hal ini dimungkinkan karena sudah tersedianya portal satu data kota Padang Panjang yang memudahkan OPD untuk meupload dan mengupdate data mereka maing-masing.
 - d. Indikator Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan infrastruktur kominfo dimana capaian kinerjanya juga masih 0 %. Hal ini dikarenakan bahwa survey kepuasan masyarakat yang dilaksanakan oleh LPPM UNAND pada bulan September lalu masih dalam proses penyusunan laporan. Sebagai tindaklanjut, untuk konsistensi hasil survey selanjutnya bidang terkait akan melaksanakan koordinasi dan konsolidasi dengan pihak surveyor.
3. Secara rata-rata realisasi kinerja pada triwulan ini dengan target sebesar 80% terealisasi sebesar sudah mencapai 79% atau capaian kinerja sebesar 99%. Hal ini disebabkan adanya kegiatan yang maksimal dilaksanakan dikarenakan refocusing anggaran.
 4. Untuk realisasi keuangan dari target sebesar 87,04% baru terealisasi sebesar 72,31% atau dengan capaian kinerja sebesar 83.07%. Rendahnya realisasi keuangan ini sebagian besar disebabkan belum terealisasinya beberapa belanja modal yang cukup besar terkait dengan langganan internet dan kerjasama pihak ketiga.
 5. Selanjutnya berdasarkan berbagai kondisi di atas, Kadis mengingatkan masing masing pejabat terkait untuk mengupayakan pemenuhan kinerja sesuai target masing-masing dan merealisasikan kegiatan yang masih tertunda.

Demikian Notulen rapat ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Mengetahui :

Kepala Dinas Kominfo Kota Padang Panjang



Drs. AMPERA, SH., Si
19680101 199803 1 010

Notulis,

Perencana Ahli Muda
Dinas Kominfo Kota Padang Panjang,



VITRI YENNITA, SH
NIP. 198201717 200802 2 001

DAFTAR HADIR RAPAT

DAFTAR HADIR

Acara : Rapat Evaluasi Kinerja Trimester III
 Hari/Tanggal : Selasa/01 Oktober 2023
 Tempat : Dinas Kominfo Pdg Pangajene

NO	NAMA	U/P	LOKASI	TANDA TANGAN
1	Amrullah	L	Kabid	
2	Ara D. Amara	L	Staf	
3	Ambari Ayu	L	Gov	
4	Marnela	L	ILUP	
5	MUWAL ANSADA	L	Statistik	
6	Rosa	P	Staf	
7	Dina Ranaqfi	L	Pakam	
8	Wahyuni	P	Subj. UP	
9	Henny Sultha	L	Pir	
10	Budi	L	Ditum	
11	Yuli Mosa	P	Plup	
12	Edy Supriat	P	Staf	
13	Eli Mantiarty	P	Ditp	
14	TERI PUTRA	L	STAF	
15	Asyraf	L	Staf	
16	Vini Yenni	P	Beracem	
17	Harri Achi Rosa	L	Staf	
18	Dony Supriat	L	Staf	
19	Fedy Atarata	L	UPIKOS	
20	Wahyuni G. Rahayu	P	Pakam	
21	Wahyuni G. Rahayu	P	Staf	
22	Budi Syah	L	Staf	
23				
24				
25				

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
 Pdg Pangajene




FOTO RAPAT



PENGUKURAN KINERJA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PADANG PANJANG
TRIWULAN IV TAHUN 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi s/d Triwulan ini	% Capaian	Permasalahan	Solusi
				I	II	III	IV				
1	Meningkatnya kinerja pemerintahan yang responsif, efisien, efektif, transparan	Indeks SPBE	2.90	-	-	-	2.93	2.93	101%		
2	Meningkatnya keterbukaan informasi publik	Persentase Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik	100	-	-	-	96,91	96,91	97%	Target capaian Renstra untuk indikator ini hanya sebesar 94%, dikarenakan sudah tercapai di 2022 maka dalam PK 2024 target dinaikkan menjadi 100%	Capaian Kinerja untuk indikator ini sudah melewati target Renstra
3	Tersedianya data statistik sektoral yang memenuhi prinsip satu data Indonesia	Persentase data statistik sektoral yang terpublikasi	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%		
4	Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur kominfo	Nilai IKM Kominfo	87	-	-	-	87.54	87.54	101%		

No	Program dan Kegiatan	Pagu (Rp)	Triwulan IV		Ket
			Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3,787,485,789	3,700,398,368	97.70%	
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3,025,943,239	2,978,769,930	98.44%	
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3,025,943,239	2,978,769,930	98.44%	
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	309,747,350	306,206,798	98.86%	
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8,141,000	8,073,000	99.16%	
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	21,103,900	21,041,000	99.70%	
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15,023,450	12,574,850	83.70%	
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	265,479,000	264,517,948	99.64%	
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	306,318,400	286,957,540	93.68%	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	110,000,000	99,559,288	90.51%	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	196,318,400	187,398,252	95.46%	
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	145,476,800	128,464,100	88.31%	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	82,388,800	77,208,000	93.71%	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	4,780,000	2,422,100	50.67%	
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	31,868,000	31,734,000	99.58%	
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	26,440,000	17,100,000	64.67%	

2	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2,515,758,200	2,491,833,598	99.05%	
	Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2,515,758,200	2,491,833,598	99.05%	
	<i>Sub Kegiatan Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik</i>	268,804,500	254,945,877	94.84%	
	<i>Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik</i>	359,866,600	354,800,132	98.59%	
	<i>Sub Kegiatan Layanan Hubungan Media</i>	1,883,087,100	1,878,543,839	99.76%	
	<i>Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas</i>	4,000,000	3,543,750	88.59%	
3	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	2,653,626,800	2,457,460,534	92.61%	
	Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2,653,626,800	2,457,460,534	92.61%	
	<i>Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik</i>	298,076,800	267,355,002	89.69%	
	<i>Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah</i>	2,355,550,000	2,190,105,532	92.98%	
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	29,980,000	18,877,500	62.97%	
	Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	29,980,000	18,877,500	62.97%	
	<i>Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral</i>	29,980,000	18,877,500	62.97%	
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	11,937,000	11,485,875	96.22%	
	Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	11,937,000	11,485,875	96.22%	
	<i>Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik</i>	11,937,000	11,485,875	96.22%	

Padang Panjang, 5 Januari 2024
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kota Padang Panjang



DRS. AMPERA, SH, M.Si
NIP. 19680101199803 1 010

NOTULEN RAPAT

- Hari/Tanggal : Kamis, 4 Januari 2024
- Tempat : Ruang Rapat Dinas Kominfo
- Waktu : 09.00 WIB s.d. selesai
- Pimpinan Rapat : Kadis Kominfo Kota Padang Panjang
- Peserta : Pegawai di lingkungan Dinas Kominfo Kota Padang Panjang
- Acara : Rapat Evaluasi Kinerja Dinas Kominfo Triwulan IV Tahun 2023
- Hasil Rapat : 1. Rapat membahas tentang evaluasi pencapaian Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Program pada Dinas Kominfo Kota Padang Panjang pada Triwulan IV Tahun 2023 sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Renstra dan tertuang dalam Perjanjian Kinerja masing masing Pejabat Struktural Eselon II, II dan IV pada Dinas Kominfo.
2. Untuk pencapaian Kinerja Utama, berdasarkan pemaparan masing masing kepala bidang terkait, adalah sebagai berikut :

Kabid EGovernment :

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Indeks SPBE	2,90	na	na

Penilaian indeks ini dilakukan melalui evaluasi secara langsung oleh Kementrian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) secara daring mempedomani Permenpan Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Sampai awal januari 2023, hasil penilaian oleh Kemenpan RB, terkait nilai indeks SPBE Kota Padang Panjang pada tahun 2023 belum didapatkan karena belum dirilis secara resmi. Untuk itu capaian untuk IKU ini belum tersedia

Kabid IKP :

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik	100%	96,91%	96,91%

Berdasarkan hasil assesment Komisi Informasi (KI) Provinsi Sumatera Barat terhadap badan layanan publik (PPIB) Kota Padang Panjang, dari target yang ditetapkan pada perubahan perjanjian kinerja sebesar 100% diperoleh hasil Persentase Keterbukaan Informasi Publik sebesar 96,91% dalam artian “informatif” atau capaian kinerja 107%. Dengan capaian ini Kota Padang Panjang mendapat peringkat ke 2 dari 19 Kabupaten/Kota se Sumatera Barat terkait keterbukaan Badan Publik. Target dalam Perjanjian Kinerja ini sedikit lebih tinggi dari target yang dicantumkan dalam Renstra sebesar 94%. Hal ini disebabkan pada tahun 2022 untuk indikator ini sudah teralisasi sebesar 99,92%.

Kabid E Government :

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Persentase data statistik sektoral yang terpublikasi	100%	100%	100%

Berdasarkan hasil evaluasi pada akhir tahun 2023 untuk indikator ini sudah terealisasi sebesar 100 % atau dengan capaian kinerja sebesar 100 %. Pengukuran indikator ini dilakukan melalui evaluasi terhadap persentase jumlah OPD yang telah mempublikasikan data statistik sektoralnya melalui portal serambi satu data, dimana dari 23 OPD yang ada, keseluruhannya sudah mempublikasikan data statistik sektoralnya pada portal data.padangpanjang.go.id.

Kabid E Government :

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Nilai IKM Layanan Infrastruktur TI Kominfo	87	87,54	101%

Berdasarkan hasil survey dari LPPM Unand, dari sebaran questioner kepuasan masyarakat terhadap layanan infrastruktur TI yang disediakan Kominfo didapat nilai 87,54 dalam artian baik. Realisasi ini menjadikan capaian untuk indikator ini mencapai 101 %.

3. Secara umum dari penjelasan masing masing bidang tersebut dapat disimpulkan bahwa capaian indikator kinerja utama Dinas Kominfo sudah cukup baik. Khusus untuk indikator indeks SPBE yang belum tersedia akan ditindaklanjuti dengan menghubungi pihak Kemenpan agar bisa didapatkan secepatnya.

Demikian Notulen rapat ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Mengetahui :

Kepala Dinas Kominfo Kota Padang Panjang,



Drs. Ampera, SH, M.Si
19680101 199803 1 010

Notulis,

Perencana Ahli Muda
Dinas Kominfo Kota Padang Panjang,



VITRI YENNITA, SH
NIP. 198201717 200802 2 001

DAFTAR HADIR

DAFTAR HADIR

Acara : Rapat Evaluasi Kinerja TW IV TA. 2023
 Hari/ Tanggal : Kamis, 4 Januari 2023
 Tempat : Ruang Kadiskominfo

NO	NAMA	L/P	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Ampera Salim	L	Kadis	1
2	Ario Dian Pratama	L	Subsecretaris	2
3	IRMI SYAFRITA	P	Sekretariat	3
4	<i>[Signature]</i>	L	<i>[Signature]</i>	4
5	YUVALIANDA	L	Statistisi	5
6	Lin Salmiruzati	P	Esai	6
7	Hany Sulisto	L	Prabowo Ah. Mude	7
8	Budiono	L	" "	8
9	Dina Hunaefi	P	Prabowo AM	9
10	Vini Yeanfi	P	Perencana AM	10
11	TERI PUTRA	L	Analisis Sekretariat	11
12	Y. L. Hery	P	Prabowo	12
13	NOFRIMO PUTRA	L	Prabowo	13
14	Eny Suparti	P	Sekretariat	14
15	Olgo Febrian	L	stag	15
16	Elni Novarty	P	stag	16
17	Rozzi	P	stag	17
18	Intan Muzika Sini	P	stag	18
19	Fras Sofia Rahm	L	stag	19
20	VERA-ARNELLA	P	stag	20
21	FAISDIANDI SEPTIATANA	L	stag	21
22	M Fathan Armanda	L	IKP	22
23	APRILY LONDANA	L	IKP	23
24	ANDES M	L	IKP	24
25	Dety Suparna	L	stag	25

Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika

Kota Padang Panjang

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

ARNO DIAN PRAVAMA, ST

NIP. 49120808 200902 1 001



FOTO PELAKSANAAN RAPAT EVALUASI KINERJA TW IV

